

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD)
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2019**



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
TAHUN 2020**

BAB III
URUSAN KONKUREN, FUNGSI PENUNJANG DAN
URUSAN PEMERINTAH UMUM

A. URUSAN KONKUREN

1. PROGRAM KEGIATAN

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran :

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik;
- c. Penyediaan jasa Kebersihan, Pengaman dan Sopir Kantor;
- d. Penyediaan Alat Tulis Kantor;
- e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
- f. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor;
- g. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
- h. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
- i. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- j. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan ke luar daerah;
- k. Penyediaan Jasa Informasi, Dokumentasi, dan Publikasi;
- l. Penyediaan Jasa Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur;
- m. Penyediaan Makanan dan Minuman;
- n. Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur :

- a. Pengadaan Mebeleur
- b. Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi;
- c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;
- d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur;
- e. Pemeliharaan Rutin Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi;
- f. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor;
- g. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional;
- h. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor;

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur :

- a. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya.

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan :

- a. Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD;
- b. Penatausahaan Keuangan SKPD.
- c. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;

d. Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset SKPD.

5. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan :

- a. Jambore Pemuda Indonesia (JPI);
- b. Seleksi Pelatihan serta Karyawisata PASKIBRAKA;
- c. Pendidikan Bela Negara
- d. Peningkatan Wawasan Kebangsaan Pemuda
- e. Bimbingan dan Pelatihan Kewirausahaan Enterpreneurship Pemuda
- f. Pembinaan dan Pemilihan Pemuda Pelopor

6. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga :

- a. Kejuaraan Nasional
- b. Pekan Olahraga Perlombaan Daerah (PEPOLDA)
- c. Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS)
- d. Kejurnas Antar PPLP/SKO Prov. Sumbar
- e. Penyelenggaraan Hari Olahraga Nasional Sumatera Barat (HAORNAS)
- f. Pembinaan dan Fasilitasi Atlet Kebakatan Olahraga Sumbar
- g. Pengadaan Makan Minum Atlet/Siswa Kebakatan Olahraga Sumbar
- h. Bonus POPWIL
- i. Pekan Paralympic Daerah (PEPARDA)
- j. Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA)
- k. Pekan Paralympic Pelajar Nasional (PEPARPENAS)
- l. Bonus Olahraga Layanan Khusus (PORNAS SOIna)
- m. Pekan Olahraga dan Seni Pondok Pesantren Nasional (POSPENAS)
- n. Penyelenggaraan Festival Olahraga Rekreasi Tingkat Nasional (FORNAS)
- o. Pekan Olahraga Bela Diri Daerah (PORDIDA)
- p. Bonus Kejurnas Antar PPLP Tahun 2018

7. Program Pengembangan Organisasi Pemuda dan Manajemen Olahraga :

- a. Rapat Kerja Teknis Pemuda dan Olahraga
- b. Peningkatan SDM Tenaga Keolahragaan Tingkat Dasar dan Lanjutan Se Sumatera Barat
- c. Pelatihan Peningkatan Mutu Organisasi Pemuda
- d. Monev Pelaksanaan Program dan Kegiatan APBD dan APBN
- e. Lomba Kreatifitas Pramuka Berprestasi

8. Program Peningkatan Penyadaran Kepemudaan :

- a. Sosialisasi Berinternet Cerdas Bagi Pemuda
- b. Politik Cerdas Berintegritas Bagi Pemuda

- c. Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN)
- d. Pelatihan Tenaga Kepemudaan Berbasis IPTEK
- e. Desiminasi Bahaya Narkoba dan HIV/AIDS Bagi Pemuda

9. Program Peningkatan Wawasan dan Kreatifitas Seni Budaya Pemuda :

- a. Lomba Kreatifitas Pemuda

2. TINGKAT PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

No	Kegiatan	Mutu Baku			Capaian Waktu
		Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Staf menerima surat dari unit kerja lain/stakeholder dan mencatat dalam agenda surat sesuai klasifikasinya serta dicatat dalam kartu kendali	Buku agenda dan kartu disposisi	5 Menit	Surat masuk yang sudah tercatat	5 Menit
2	Staf memilah surat sesuai dengan sifat surat (surat biasa dan rahasia) untuk surat rahasia disampaikan langsung ke Kadis dan untuk surat biasa dibuka dan diberi lembar disposisi dan diteruskan ke Kasubag Umum	Surat masuk yang sudah tercatat	10 Menit	Surat masuk yang sudah dipilah	10 Menit
3	Ka. Sub Bagian Umum meneliti dan memeriksa surat dan meneruskan ke Sekretaris untuk didisposisi	Surat masuk yang sudah dipilah	10 Menit	Surat masuk yang sudah diberi lembar disposisi	10 Menit
4	Sekretaris meneliti surat yang masuk dan mendisposisi surat kemudian meneruskan ke Kadis	Surat masuk yang sudah diberi lembar disposisi	10 Menit	Surat masuk yang sudah didisposisi Sekretaris	10 Menit
5	Kepala Dinas meneliti surat masuk dan mendisposisi surat kemudian menyerahkan ke Sekretaris	Surat masuk yang sudah didisposisi Sekretaris	10 Menit	Surat masuk yang sudah didisposisi Kadis	10 Menit
6	Sekretaris menindaklanjuti sesuai disposisi Kadis dan mengembalikan ke Ka. Sub Bagian Umum untuk dicatat dan didistribusikan	Surat yang sudah didisposisi Kadis	10 Menit	Surat masuk yang sudah didisposisi Kadis	10 Menit
7	Ka. Sub Bagian Umum memilah surat sesuai dengan disposisi dan menugaskan staf untuk mencatat pada buku agenda dan mendistribusikan ke masing-masing bidang	Surat masuk yang sudah didisposisi Kadis	5 Menit	Surat masuk yang sudah didisposisi Kadis	5 Menit
8	Staf mendistribusikan surat sesuai dengan disposisi dan meminta tanda terima	Surat masuk yang sudah diberi disposisi Kadis	5 Menit	Surat masuk yang sudah didisposisi Kadis	5 Menit

**3. JUMLAH PEGAWAI, KUALIFIKASI PENDIDIKAN, PANGKAT DAN GOLONGAN,
JUMLAH PEJABAT STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL**

Tabel. 1
**Personil dan Tata Laksana berdasarkan Jabatan
Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat**

No	Jabatan	Jumlah Personil
1	Eselon 2	1
2	Eselon 3	5
3	Eselon 4	14
4	Staf PNS	65
JUMLAH		85

Tabel. 2
**Personil dan Tata Laksana berdasarkan Golongan
Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat**

No	Pangkat	Golongan	Jumlah Personil
1	Pembina Utama Madya	IV.d	-
2	Pembina Utama Muda	IV.c	-
3	Pembina Tk.I	IV.b	5
4	Pembina	IV.a	5
5	Penata Tk.I	III.d	12
6	Penata	III.c	16
7	Penata Muda Tk.I	III.b	12
8	Penata Muda	III.a	5
9	Pengatur Tk.I	II.d	2
10	Pengatur	II.c	20
11	Pengatur Muda Tk.I	II.b	7
12	Pengatur Muda	II.a	1
Jumlah			85

Tabel. 2
**Personil dan Tata Laksana berdasarkan Kualifikasi Pendidikan
Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat**

No	Pendidikan	Tk. Ijazah	Jumlah Personil
1	Doktor	S.3	-
2	Magister	S.2	16

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 2019 (LPPD)

3	Sarjana	S.1	28
4	Diploma 1	D.1	-
5	Diploma 2	D.2	-
6	Diploma 3	D.3	2
7	Menengah Atas	SMA	39
8	Menengah Pertama	SMP	-
9	Sekolah Dasar	SD	-
Jumlah			85

4. ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN

Kegiatan pembangunan yang dibiayai dengan dukungan dana APBD Tahun Anggaran 2019 terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung sebagai berikut :

	BELANJA	30.093.133.600,00	28.735.810.944,26	95,49
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	8.252.147.217,00	7.926.254.739,00	96,05
	BELANJA LANGSUNG	21.840.986.383,00	20.809.556.151,26	95,28
I	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	2.195.968.402,00	2.121.476.186,00	96,61
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	14.082.500,00	14.076.400,00	99,96
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	380.000.000,00	332.880.491,00	87,60
3	Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan Dan Sopir Kantor	877.477.842,00	865.948.000,00	98,69
4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	30.000.000,00	29.995.791,00	99,99
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	41.998.500,00	41.998.500,00	100,00
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	37.095.604,00	37.095.604,00	100,00
7	Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	49.732.000,00	49.732.000,00	100,00
8	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	31.000.000,00	31.000.000,00	100,00
9	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.545.000,00	20.545.000,00	100,00
10	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Dan Luar Daerah	567.535.872,00	558.312.000,00	98,37
11	Penyediaan Jasa Informasi, Dokumentasi Dan Publikasi	69.009.184,00	64.907.500,00	94,06
12	Penyediaan Jasa Pembinaan Mental Dan Fisik Aparatur	15.900.000,00	13.400.000,00	84,28
13	Penyediaan Makanan Dan Minuman	55.994.000,00	55.987.000,00	99,99
14	Pengelolaan, Pendataan Dan Penataan Dokumen/Arsip	5.597.900,00	5.597.900,00	100,00
II	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	1.925.104.370	1.845.151.255,26	95,85
1	Pengadaan Mebeleur	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah **2019** (LPPD)

2	Pengadaan Komputer Dan Jaringan Komputerisasi	99.995.000	99.987.200,00	99,99
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	160.000.000	144.279.841,00	90,17
4	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mebeleur	4.900.000	4.900.000	100
5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer Dan Jaringan Komputerisasi	30.275.000,00	30.143.750,00	99,57
6	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	984.434.370	941.143.164	95,6
7	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	575.800.000	555.000.000	96,39
8	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Gedung Kantor	19.700.000	19.697.300	99,99
III	PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	67.500.000,00	67.166.000,00	99,51
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	67.500.000,00	67.166.000,00	99,51
IV	PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	863.506.263,00	810.248.805,00	93,83
1	Penyusunan Perencanaan Dan Penganggaran Skpd	154.892.998,00	140.547.455,00	90,74
2	Penatausahaan Keuangan Skpd	481.400.000,00	457.441.750,00	95,02
3	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd	93.213.265,00	86.045.200,00	92,31
4	Pengelolaan, Pengawasan Dan Pengendalian Aset Skpd	134.000.000,00	126.214.400,00	94,19
V	PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN	2.313.486.111,00	2.291.720.422,00	99,06
1	Jambore Pemuda Indonesia (Jpi).	171.763.011,00	168.375.900,00	98,03
2	Seleksi, Pelatihan Dan Karyawisata Paskibraka	1.022.995.000,00	1.017.290.522,00	99,44
3	Pendidikan Bela Negara	149.985.000,00	149.985.000,00	100,00
4	Peningkatan Wawasan Kebangsaan Pemuda	83.818.600,00	83.318.600,00	99,40
5	Bimbingan Dan Pelatريان Kewirausahaan / Enterpreneuship Pemuda	750.000.000,00	738.312.000,00	98,44
6	Pembinaan Dan Pemilihan Pemuda Pelopor	134.924.500,00	134.438.400,00	99,64
VI	PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAHRAGA	12.191.884.317,00	11.439.972.483,00	93,83
1	Kejuaraan Nasional	850.000.000,00	800.801.270,00	94,21
2	Pekan Olahraga Perlombaan Daerah (Pepolda)	288.855.000,00	286.323.000,00	99,12
3	Pekan Olahraga Pelajar Nasional (Popnas)	1.700.000.000	1.578.600.199,00	92,86
4	Kejurnas Antar Pplp/Sko Sumbar	777.383.040,00	736.810.900,00	94,78
5	Hari Olahraga Nasional (Haornas)	90.000.000,00	90.000.000,00	100,00
6	Pembinaan Dan Fasilitas Atlet Kebakatan Olahraga Sumbar	1.554.122.207,00	1.350.598.552,00	86,90
7	Penyelenggaraan Invitasi Olahraga Massal	147.500.000,00	0,00	0,00

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah **2019** (LPPD)

8	Pengadaan Makan Minum Atlet/Siswa Kebakatan Olahraga Sumbar	1.939.380.560,00	1.906.135.000,00	98,29
9	Bonus POPWIL 2018	650.900.000	643.500.000	98,86
10	Pekan Paralympic Daerah (Peparda)	175.000.000,00	173.492.750,00	99,14
11	Pekan Olahraga Pelajar Daerah (Popda)	179.043.510,00	174.436.510,00	97,43
12	Pekan Paralimpic Pelajar Nasional (Peparpelnas)	300.000.000,00	258.516.940,00	86,17
13	Bonus Olahraga Layanan Khusus (Pornas Soina)	871.400.000,00	871.399.800,00	100,00
14	Pekan Olahraga Dan Seni Pondok Pesantren Nasional (Pospenas)	652.500.000,00	569.100.162,00	87,22
15	Penyelenggaraan Festival Olahraga Rekreasi Tingkat Nasional (Fornas)	800.000.000,00	787.582.400,00	98,45
16	Pekan Olahraga Beladiri Daerah (Pordida)	400.000.000,00	396.875.000,00	99,22
17	Bonus Kejurnas Antar Pplp Tahun 2018	815.800.000,00	815.800.000,00	100,00
VII	PENGEMBANGAN ORGANISASI PEMUDA DAN MANAJEMEN OLAHRAGA	1.367.344.400,00	1.324.501.300,00	96,87
1	Rapat Kerja Teknis Pemuda Dan Olahraga	140.510.400,00	127.442.800,00	90,70
2	Peningkatan Sdm Tenaga Keolahragaan Tingkat Dasar Dan Lanjutan Se Sumatera Barat	361.145.000,00	359.660.800,00	99,59
3	Pelatihan Peningkatan Mutu Organisasi Pemuda	604.000.000,00	586.960.000,00	97,18
4	Monev Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Apbd Dan Apbn	34.847.000,00	27.075.700,00	77,70
5	Lomba Kreatifitas Pramuka Berperstasi	226.842.000,00	223.362.000,00	98,47
VIII	PENINGKATAN PENYADARAN KEPEMUDAAN	766.192.520,00	763.639.700,00	99,67
1	Sosialisasi Berinternet Cerdas Bagi Pemuda	106.750.400,00	106.750.400,00	100,00
2	Politik Cerdas Berintegritas Bagi Pemuda	93.506.000,00	93.506.000,00	100,00
3	Pertukaran Pemuda Antar Negara (Ppan).	74.428.120,00	73.853.300,00	99,23
4	Pelatihan Tenaga Kepemudaan Berbasis Iptek	144.508.000,00	144.508.000,00	100,00
5	Desiminasi Bahaya Narkoba Dan Hiv/Aids Bagi Pemuda	347.000.000,00	345.022.000,00	99,43
IX	PENINGKATAN WAWASAN DAN KREATIFITAS SENI BUDAYA PEMUDA	150.000.000,00	145.680.000,00	97,12
	Lomba Kreatifitas Pemuda	150.000.000,00	145.680.000,00	97,12

5. KESESUAIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Proses Penyusunan Perencanaan Pembangunan diawali dengan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2016-2021, yang merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemuda dan Olahraga selama 5 (lima) tahun kedepan. Renstra diuraikan secara bertahap (tahunan) menjadi Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat. Rencana Kerja OPD menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Provinsi yang dibahas bersama pada Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 2019 (LPPD)

(Musrenbangda) setiap tahunnya. Hasil Musrenbangda menjadi acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUAPPAS) yang diusulkan Pemerintah Daerah ke DPRD untuk proses legalisasi, yang dituangkan dalam bentuk Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Berdasarkan proses tersebut diatas dapat dilihat kesesuaian Program/Kegiatan antara RPJMD, RKPD dan Renja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat:

KESESUAIAN PROGRAM/KEGIATAN PADA RPJMD, RKPD DAN RENJA TAHUN 2019

NO	PROGRAM / KEGIATAN		
	RPJMD	RKPD	RENJA
I	<i>Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan</i>	<i>Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan</i>	<i>Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan</i>
1		Pendidikan Bela Negara	Pendidikan Bela Negara
2		Peningkatan Wawasan Kebangsaan Pemuda	Peningkatan Wawasan Kebangsaan Pemuda
3		Napak Tilas Bela Negara (Rute PDRI)	Napak Tilas Bela Negara (Rute PDRI)
4		Jambore Pemuda Indonesia (JPI)	Jambore Pemuda Indonesia (JPI)
5		Jambore Pemuda Daerah (JPD)	Jambore Pemuda Daerah (JPD)
6		Seleksi, Pelatihan dan Karyawisata Paskibraka	Seleksi, Pelatihan dan Karyawisata Paskibraka
7		Pembinaan dan Pemilihan Pemuda Pelopor Tk. Sumbar	Pembinaan dan Pemilihan Pemuda Pelopor Tk. Sumbar
8		Bimbingan dan Pelatihan Kewirausahaan	Bimbingan dan Pelatihan Kewirausahaan
II	<i>Program Pembinaan dan Per masyarakatan Olahraga</i>	<i>Program Pembinaan dan Per masyarakatan Olahraga</i>	<i>Program Pembinaan dan Per masyarakatan Olahraga</i>
1		Pembinaan dan Fasilitasi PPLP	Pembinaan dan Fasilitasi PPLP
2		Pengadaan Makan Minum Atlet/Siswa PPLP tahun 2018	Pengadaan Makan Minum Atlet/Siswa PPLP tahun 2018
3		Kejurnas Antar PPLP/SKO Sumbar	Kejurnas Antar PPLP/SKO Sumbar
4		Pelaksanaan Uji Coba Luar Provinsi Atlet/Pelajar PPLP/SKO Sumbar	Pelaksanaan Uji Coba Luar Provinsi Atlet/Pelajar PPLP/SKO Sumbar
5		Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA)	Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA)
6		Pengiriman Kontingen POPNAS	Pengiriman Kontingen POPNAS
7		Pengiriman Kontingen POPWIL	Pengiriman Kontingen POPWIL
8		BONUS POPWIL	BONUS POPWIL
9		BONUS POPNAS	BONUS POPNAS

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 2019 (LPPD)

10		Pemanduan Bakat Usia 11 s.d 15 tahun	Pemanduan Bakat Usia 11 s.d 15 tahun
11		Pekan Olahraga Beladiri Daerah (PORDIDA)	Pekan Olahraga Beladiri Daerah (PORDIDA)
12		Pekan Olahraga Permainan Daerah (PORPERDA)	Pekan Olahraga Permainan Daerah (PORPERDA)
13		Kejuaraan Daerah Cabang Olahraga Perlombaan	Kejuaraan Daerah Cabang Olahraga Perlombaan
14		Penyelenggaraan Hari Olahraga Nasional (HAORNAS)	Penyelenggaraan Hari Olahraga Nasional (HAORNAS)
15		Penyelenggaraan Invitasi Olahraga Massal	Penyelenggaraan Invitasi Olahraga Massal
16		Penyelenggaraan Festival Olahraga Rekreasi Tk. Nasional (FORNAS)	Penyelenggaraan Festival Olahraga Rekreasi Tk. Nasional (FORNAS)
17		Penyelenggaraan Pekan Paralimpic Pelajar Daerah tingkat Provinsi Sumatera Barat (PEPARPELDA)	Penyelenggaraan Pekan Paralimpic Pelajar Daerah tingkat Provinsi Sumatera Barat (PEPARPELDA)
18		Penyelenggaraan Pekan Paralimpic Daerah tingkat Provinsi Sumatera Barat (PEPARDA) Pra PON	Penyelenggaraan Pekan Paralimpic Daerah tingkat Provinsi Sumatera Barat (PEPARDA) Pra PON
19		Pemberangkatan Kontingen Pondok Pesantren Tk. Nasional (POSPENAS)	Pemberangkatan Kontingen Pondok Pesantren Tk. Nasional (POSPENAS)
20		Penyelenggaraan Olahraga Tradisional Tk. Nasional	Pemberangkatan Kontingen Pekan Olahraga Mahasiswa ke Tingkat Nasional (POMNAS)
21		Pekan Olahraga Pondok Pesantren Daerah (POSPEDA)	Pusat Pembinaan dan Latihan Olahraga Mahasiswa Daerah (PPLM/D)
22		Pemberangkatan Kontingen Pekan Paralimpic Pelajar Nasional (PEPARPELNAS)	Penyelenggaraan Olahraga Tradisional Tk. Nasional
23		Bonus Olahraga Layanan Khusus (SOINA)	Penyelenggaraan Hari Krida Olahraga ASN Prov. Sumbar
24			Pekan Olahraga Pondok Pesantren Daerah (POSPEDA)
25			Pemberangkatan Kontingen Pekan Paralimpic Pelajar Nasional (PEPARPELNAS)
26			Bonus Olahraga Layanan Khusus (SOINA)
III	<i>Program Pengembangan Organisasi dan Manajemen Olahraga</i>	<i>Program Pengembangan Organisasi dan Manajemen Olahraga</i>	<i>Program Pengembangan Organisasi dan Manajemen Olahraga</i>
1		Lomba Kreatifitas Pramuka Berperstasi	Lomba Kreatifitas Pramuka Berperstasi
2		Lomba dan Pelatihan Peningkatan Mutu Organisasi Pemuda	Lomba dan Pelatihan Peningkatan Mutu Organisasi Pemuda
3		TC POPNAS	TC POPNAS
4			TC POPWIL

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | 2019
(LPPD)

5		Peningkatan SDM Tenaga Keolahragaan Tingkat Dasar dan Lanjutan Se Sumatera Barat	Peningkatan SDM Tenaga Keolahragaan Tingkat Dasar dan Lanjutan Se Sumatera Barat
6		Penyusunan Data Base Pemuda dan Olahraga	
7		Monev Pelaksanaan Program dan Kegiatan APBN dan APBD	
8		Rapat Kerja Teknis Pemuda dan Olahraga	
IV	Program Peningkatan Wawasan dan Kreativitas Seni Budaya Pemuda	Program Peningkatan Wawasan dan Kreativitas Seni Budaya Pemuda	Program Peningkatan Wawasan dan Kreativitas Seni Budaya Pemuda
1		Lomba Pidato Adat	Lomba Pidato Adat
2		Lomba Kreativitas Pemuda	Lomba Kreativitas Pemuda
V	Program Peningkatan Penyadaran Kepemudaan	Program Peningkatan Penyadaran Kepemudaan	Program Peningkatan Penyadaran Kepemudaan
1		Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN)	Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN)
2		Peningkatan Kapasitas Pemuda	Peningkatan Kapasitas Pemuda
3		Pelatihan Tenaga Kepemudaan Berbasis Iptek	Gelar Karya Pemuda Nagari
4		Lomba Inovasi Iptek Pemuda Tingkat Sumatera Barat	Pelatihan Tenaga Kepemudaan Berbasis Iptek
5		Pemberdayaan Pemuda Iptek Berbasis Imtaq	Lomba Inovasi Iptek Pemuda Tingkat Sumatera Barat
6		Sosialisasi Berinternet Cerdas Bagi Pemuda	Pemberdayaan Pemuda Iptek Berbasis Imtaq
7		Politik Cerdas Berintegritas bagi Pemuda	Sosialisasi Berinternet Cerdas Bagi Pemuda
8		TOT Pembinaan Kepribadian Pemuda	Politik Cerdas Berintegritas bagi Pemuda
9		Desiminasi Bahaya Narkoba dan HIV/AIDS bagi Pemuda	TOT Pembinaan Kepribadian Pemuda
10			Desiminasi Bahaya Narkoba dan HIV/AIDS bagi Pemuda
VI	Program Manajemen Layanan Teknis Lainnya		Program Manajemen Layanan Teknis Lainnya
1			Penyusunan Data Base Pemuda dan Olahraga

2			Rapat-Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Kegiatan Operasional Program Pemuda dan Olahraga Kab./Kota
3			Monev Pelaksanaan Program dan Kegiatan APBN dan APBD
4			Rapat Kerja Teknis Pemuda dan Olahraga

Dari table tersebut dapat dijelaskan bahwa Program dan kegiatan yang ada pada Renja Tahun 2019 Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat mengalami beberapa perubahan berdasarkan pembahasan dengan tim Bappeda Provinsi Sumatera Barat Bidang Sosial Budaya

6. SARANA DAN PRASARANA

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan, dengan kata lain sarana merupakan fasilitas yang dipakai secara langsung. Sedangkan Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses / kegiatan.

Sarana dan prasarana yang ada pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel. 3
Daftar Sarana dan Prasarana
Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat

NO	NAMA	JUMLAH UNIT	KONDISI
1	Genset	3 Unit	Baik
2	Water Fam	1 Unit	Baik
3	Mesin Pompa Air	2 Unit	Baik
4	Meja 1/2 Biro	2 Unit	Baik
5	Mesin Tik	4 Unit	Baik
6	Filling Kabinet 2 Pintu	10 Unit	Baik
7	Lemari Besi 2 Pintu	6 Unit	Baik
8	Lemari Buku	2 Unit	Baik
9	Rak Besi Siku	1 Unit	Baik
10	Rak Siku	1 Unit	Baik
11	Filling Kabinet 5 Laci	16 Unit	Baik
12	Filling Kabinet 4 Laci	1 Unit	Baik
13	Brankas	2 Unit	Baik
14	Estalase	1 Unit	Baik
15	Mesin Tik	1 Unit	Baik
16	White Board	2 Unit	Baik
17	Mesin Absensi	2 Unit	Baik
18	Lcd Proyektor	5 Unit	Baik
19	Infocus	2 Unit	Baik
20	Lamari Arsip	1 Unit	Baik
21	Mesin Potong Rumput	3 Unit	Baik
22	Sound System	2 Unit	Baik

23	Wireless	1 Unit	Baik
24	Ups/Stabilizer	1 Unit	Baik
25	Komputer Pc	27 Unit	Baik
26	Laptop	15 Unit	Baik
27	Notebook	5 Unit	Baik
28	Ups	7 Unit	Baik
29	Printer	20 Unit	Baik
30	Scaner	1 Unit	Baik
31	Kursi Kerja Pejabat Eselon Iii	6 Unit	Baik
32	Mesin Faximel	1 Unit	Baik
33	Treandmil	1 Unit	Baik
34	Toa	1 Unit	Baik
35	Sansak	1 Unit	Baik
36	Matras Judo	1 Unit	Baik
37	Pembungkus Matras Senam	1 Unit	Baik
38	Trampolin Mini	1 Unit	Baik
39	Palang Sejajar	1 Unit	Baik
40	Head Guard	1 Unit	Baik
41	Alat-Alat Fitnes/Olahraga	5 Unit	Baik
42	Matras Gulat	1 Unit	Baik
43	Cover Matras Gulat	1 Unit	Baik
44	Strenght Trainer (Bench Press)	1 Unit	Baik
45	Strenght Trainer (Lower Body)	1 Unit	Baik
46	Sansak Tegak Electronic	1 Unit	Baik

7. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

1) Permasalahan:

Permasalahan utama terkait pembinaan dan prestasi olahraga serta pembinaan Pemuda Sumatera Barat :

- a) Masih minimnya sarana dan prasarana olah raga.
- b) Masih terbatasnya pelaksanaan peningkatan SDM tenaga keolahragaan di seluruh Kabupaten/Kota.
- c) Minimnya uji coba yang dilakukan oleh masing-masing cabang olah raga.
- d) Anggaran untuk pembinaan dan prestasi olahraga relatif masih rendah.
- e) Kegiatan keolahragaan yang dilaksanakan oleh Dispora Sumatera Barat belum semua mencakup populasi cabang olahraga yang tersebar di 19 Kabupaten/Kota di Sumatera Barat.
- f) Jumlah pemuda dengan sarana dan program kegiatan tidak sesuai.
- g) Terbatasnya koordinasi dengan Kabupaten/Kota.

2) Solusi :

Solusi permasalahan utama terkait pembinaan dan prestasi olahraga serta pembinaan Pemuda Sumatera Barat :

- a) Peningkatan Sarana dan Pra Sarana Olahraga.
- b) Menambah program kegiatan dalam rangka peningkatan SDM tenaga keolahragaan.

- c) Melakukan pembinaan secara berkelanjutan untuk cabang olahraga unggulan.
- d) Memperbanyak uji coba bagi cabang-cabang olah raga sebelum mengikuti *event* Nasional.
- e) Memperbanyak pelaksanaan kegiatan pelatihan kepemudaan.
- f) Mengadakan sinkronisasi program/kegiatan dengan kabupaten/kota sebelum tahun anggaran.

8. PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN DEKONSENTRASI

A. Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2010 tentang Kepemudaan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
- 2) Undang-Undang nomor 3 Tahun 2015 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
- 3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang; Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun 2019;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantu (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
- 5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2018 tentang; Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
- 6) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat, Nomor :
 - SP DIPA No-092.01.3.080072/2019;

B. Program dan Kegiatan

Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2019 mendapat alokasi dana dekonsentrasi dari Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia dengan total anggaran sebesar Rp.4.555.880.000,- yang teralokasi pada 1 Satker kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Program Kepemudaan dan Keolahragaan, dengan kegiatan :
 - Peningkatan Wawasan Pemuda.
 - Pengelolaan Pembinaan Sentra dan Sekolah Khusus Olahraga.
- 2) Program Pembinaan Olahraga Prestasi, dengan kegiatan :
 - Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan.

C. Realisasi Program dan Kegiatan

Sampai dengan akhir Desember 2019, pelaksanaan program kegiatan dekonsentrasi pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat yang di dukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp.4.555.880.000,- dapat terealisasi sebesar Rp.4,413965.813,- atau (97.09%) realisasi fisik 100%, dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Program Kepemudaan dan Keolahragaan, mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.4.405.880.000,- terealisasi sebesar Rp.4.264.565.913,- atau (96.86%) fisik 100% dengan output :
 - Peningkatan Wawasan Pemuda
 - Pengelolaan Pembinaan Sentra dan Sekolah Khusus Olahraga
- 2) Program Pembinaan Olahraga Prestasi, dilaksanakan dengan dukungan anggaran sebesar Rp.150.000.000,- dapat terealisasi sebesar Rp.149.399.900,- atau (99.6%) fisik 100% dengan output :
 - Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan

D. Outcomes

- 1) Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Pembinaan Kementerian Pemuda dan Olahraga secara Efektif, Efisien, dan Tanggungjawab sesuai ketentuan, dengan indikator :
 - meningkatnya layanan Kepemudaan bidang pemberdayaan pemuda
 - meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan Olahraga
 - meningkatnya kualitas pengelolaan sentra keolahragaan dan sekolah khusus keolahragaan
 - meningkatnya prestasi Olahraga Indonesia di tingkat Regional dan Internasional

Padang, Februari 2019
Kepala,

Drs. Bustavidia, MM
NIP. 19640501 199303 1 006

No	ASPEK	FOKUS		IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	Capaian Kinerja	OPD Penanggungjawab
1	KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DAERAH	Peraturan ttg ketertiban penataan ruang	1	Kab/kota memiliki Perda IMB	Jumlah kab/kota memiliki perda IMB dibagi jumlah kab/kota yang wajib menyampaikan LPPD dalam provinsi	Jumlah kab/kota memiliki perda IMB Jumlah kab/kota usia di atas 3 tahun dan Kepala Daerah terpilih	...Kab/kota %	Dinas PMPTSP
		Peraturan ttg Ketertiban Umum	2	Kab/kota memiliki perda tentang ketertiban umum	Jumlah kab/kota memiliki perda Ketertiban Umum dibagi jumlah kab/kota yang wajib menyampaikan LPPD x 100%	Jumlah kab/kota memiliki perda Ketertiban Umum Jumlah kab/kota yang wajib menyampaikan LPPD	...Kab/kota %	Dinas Satpol PP
		Personil (Kebijakan ketersediaan alat tramtib)	3	Rasio personil Satpol PP terhadap jumlah penduduk	Jumlah personil SATPOL PP pada akhir tahun 2019 dibagi jumlah penduduk kali 50.000.	Personil Satpol PP (PNS) pada tahun 2019 Penduduk pada akhir tahun 2019	orang %	Dinas Satpol PP dan Dinas PPKBPS
2	KESELARASAN DAN EFEKTIVITAS HUBUNGAN ANTARA PEMDA DAN PEMERINTAH, SERTA ANTAR PEMDA DALAM RANGKA PENGEMBANGAN OTDA	Penyampaian laporan kepada pemerintah	4	Ketepatan waktu penyampaian LPPD berdasarkan PP Nomor 13 tahun 2019	Tepat atau tidak tepat penyampaian sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh peraturan perundangan	Tanggal Penyampaian LPPD 2019 (tanggal/bulan/tahun)	Tgl penyampaian	Biro Pemerintahan
			5	Ketepatan waktu penyampaian Laporan keuangan dan Laporan kinerja berdasarkan PP 8/2006	Tepat atau tidak tepat penyampaian sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh peraturan perundangan	Tanggal Penyampaian Laporan Keuangan 2019 berdasarkan bukti tanda terima (tanggal/bulan/tahun) Tanggal Penyampaian Laporan Kinerja 2019 berdasarkan bukti tanda terima (tanggal/bulan/tahun)	Tgl penyampaian Tgl penyampaian	Badan Keuangan Daerah Biro Organisasi
		Implementasi SPM	6	Pemerintah Daerah yang memiliki Produk Hukum Daerah tentang SPM	Total Kabupaten/Kota yang sudah memiliki Perda/Perkada tentang Penerapan SPM x 100%, Rata-rata=... urusan=... Kab/Kota	1. Kab/Kota ___ = ada atau tidak	... Kab/kota	Biro Pemerintahan
						2. Kab/Kota ___ = ada atau tidak		
						3. Kab/Kota ___ = ada atau tidak		
						4. Kab/Kota ___ = ada atau tidak		
						5. Kab/Kota ___ = ada atau tidak		
Dst..								
Jumlah = ada atau tidak								
Hubungan antar daerah	7	Kerjasama dengan daerah lain	Jumlah MOU pemprov dengan daerah lain (yang masih berlaku tahun 2019)	Jumlah MOU yang masih berlaku per tahun 2019	Jumlah	Biro Adm Pembangunan, Kerjasama dan Rantau		
				1. No dan tgl MOU yang berlaku s.d tahun 2019	No&tgl MOU			
				2. No dan tgl MOU yang berlaku s.d tahun 2019MoU			
				3. No dan tgl MOU yang berlaku s.d tahun 2019MoU			
Sinkronisasi Pelaksanaan pembangunan nasional dan daerah	8	Kesesuaian prioritas pembangunan nasional	Jumlah prioritas pembangunan daerah dibagi jumlah prioritas 1 pembangunan nasional	Prioritas pembangunan daerah (RKPD) yang mendukung prioritas pembangunan nasional	Prioritas Pembangunan	Bappeda		
				Prioritas Pembangunan Nasional ada sebanyak 5 program prioritas	Prioritas Pembangunan			
				1. Kab/kota ___ = ___ urusan				
Kewenangan	9	Rata-rata urusan yang dilaksanakan pada seluruh kab/kota dibagi 26 (Jumlah urusan wajib di PP 38/2018) X 100%	Total urusan yang dilaksanakan seluruh Kab/Kota dibagi jumlah Kab/Kota yang wajib menyampaikan LPPD x 100% Rata-rata=... urusan=... Kab/kota	2. Kab/kota ___ = ___ urusan		Biro Pemerintahan		
				3. Dst...				
				Jumlah = ___ urusan				
Keuangan	10	Waktu penetapan Perda APBD tahun 2019	Tepat atau tidak tepat waktu penetapan PERDA APBD 2019 (31 Desember 2019)	Kab/kota yang wajib menyampaikan LPPD sebanyak ___ Kab/Kota Kab/kota	Badan Keuangan Daerah		
				Apabila TEPAT: Sebutkan dasar hukumnya. PERDA Nomor : -----Tahun ----- tentang ----- APBD tahun 2019	tgl penetapan			

No	ASPEK	FOKUS	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	Capaian Kinerja	OPD Penanggungjawab			
3	KESELARASAN ANTARA KEBIJAKAN PEMDA DENGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH	Keuangan	11	Keberadaan Perda tentang pengelolaan keuangan daerah berdasarkan PP 58/2005	ada atau tidak adanya PERDA tentang pengelolaan keuangan daerah	Apabila ADA: Sebutkan dasar hukumnya. PERDA Nomor : ----Tahun ----- tentang ----- (pengelolaan keuangan daerah)	Ada/tidak	Badan Keuangan Daerah		
			12	belanja untuk pelayanan dasar	Jumlah belanja untuk pelayanan dasar dibagi jumlah total belanja x 100%	Total Belanja pelayanan dasar APBD Tahun 2019 1. Urusan Pendidikan 2. Urusan Kesehatan 3. Urusan PU dan Penataan Ruang 4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 5. Urusan Sosial 6. Urusan Trantibum dan Linmas Total Belanja APBD	Rp Rp Rp Rp Rp Rp	Badan Keuangan Daerah		
			13	belanja untuk urusan pendidikan dan kesehatan	Jumlah belanja untuk kesehatan dan pendidikan dibagi jumlah total belanja x 100 %	Total belanja urusan pendidikan dan kesehatan 1. Urusan Pendidikan 2. Urusan Kesehatan	Rp Rp Rp	Badan Keuangan Daerah		
			Pelayanan publik	14	Keberadaan PERDA tentang Standar Pelayanan Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan	ada atau tidak adanya standar pelayanan publik	ada/tidak PERDA tentang Standar Pelayanan Publik	Ada/tidak	Biro Organisasi	
			Kepegawaian	15	Rasio PNS terhadap penduduk	Jumlah PNS Provinsi dibagi Jumlah Penduduk	Jumlah PNS Provinsi akhir tahun 2019 Penduduk pada akhir tahun 2019	orang Jiwa	%	BKD dan Dinas PPKBPS
		16		Persentase PNS Memiliki Kualifikasi Pendidikan Tinggi minimal D III (PNS tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)	Jumlah PNS Memiliki Kualifikasi Pendidikan Tinggi Minimal D III dibagi Jumlah PNS dikali 100%	Jumlah PNS Provinsi tahun 2019 yang memiliki Kualifikasi Pendidikan Tinggi Minimal D III (Diluar Guru dan Tenaga Kesehatan) Jumlah PNS Provinsi tahun 2019 (Diluar Guru dan Tenaga Kesehatan)	orang orang	%	BKD	
			Kelembagaan	17	Penataan Perangkat Daerah	Jumlah Pembentukan OPD berdasarkan PP 18/2016	Jumlah OPD 1. Biro (setda) 2. Dinas 3. Badan 4. Kantor 5. Rumah Sakit 6. Lembaga Teknis lainnya 7. Kabupaten/kota	Unit Unit Unit Unit Unit Unit	Biro Organisasi	
		4	EFEKTIVITAS HUBUNGAN ANTARA PEMDA DAN DPRD	Produk peraturan perundangan	18	Perda yang ditetapkan	Jumlah PERDA yang ditetapkan dalam tahun 2019	PERDA yang ditetapkan dalam tahun 2019 1. No dan Tgl PERDA yang ditetapkan tahun 2019 #1 2. No dan Tgl PERDA yang ditetapkan tahun 2019 #2 3. No dan Tgl PERDA yang ditetapkan tahun 2019 #3 4. No dan Tgl PERDA yang ditetapkan tahun 2019 #4 5. No dan Tgl PERDA yang ditetapkan tahun 2019 #5 6. No dan Tgl PERDA yang ditetapkan tahun 2019 #6 7. No dan Tgl PERDA yang ditetapkan tahun 2019 #7 8. No dan Tgl PERDA yang ditetapkan tahun 2019 #8 9. No dan Tgl PERDA yang ditetapkan tahun 2019 #9 10. No dan Tgl PERDA yang ditetapkan tahun 2019 #10 11. No dan Tgl PERDA yang ditetapkan tahun 2019 #11 12. No dan Tgl PERDA yang ditetapkan tahun 2019 #12	Perda No&tgl perda No&tgl perda No&tgl perda No&tgl perda No&tgl perda No&tgl perda No&tgl perda No&tgl perda No&tgl perda No&tgl perda No&tgl perda	Biro Hukum
					19	Raperda yang diajukan tahun berjalan	Jumlah RAPERDA yang disetujui DPRD tahun 2019	Jumlah RAPERDA yang disetujui DPRD tahun 2019 dibagi Jumlah RAPERDA yang diusulkan tahun 2019	RAPERDA yang disetujui DPRD tahun 2019 RAPERDA yang diusulkan tahun 2019	Raperda Raperda
		5	EFEKTIVITAS PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN OLEH DPRD BESERTA TINDAK LANJUT PELAKSANAAN KEPUTUSAN	Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti	20	Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti	Jumlah Keputusan DPRD tahun 2019 yang ditindaklanjuti pada tahun 2019 dibagi jumlah Keputusan DPRD tahun 2019 x 100%	Jumlah Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti oleh DPRD pada tahun 2019 Jumlah Keputusan DPRD yang dihasilkan tahun 2019	Keputusan Keputusan	%

No	ASPEK	FOKUS		IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	Capaian Kinerja		OPD Penanggungjawab	
6	EFEKTIVITAS PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN OLEH KDH BESERTA TINDAK LANJUT PELAKSANAAN KEPUTUSAN	tindaklanjut keputusan KDH	21	Keputusan Gubernur yang ditindaklanjuti	Jumlah keputusan Gubernur yang ditindaklanjuti dibagi jumlah keputusan Gubernur dalam tahun 2019 x 100%	Keputusan Gubernur tahun 2019 yang ditindaklanjuti	Kep	%	Biro Hukum	
		tindaklanjut Peraturan KDH	22	Peraturan Gubernur yang ditindaklanjuti	Jumlah peraturan Gubernur yang ditindaklanjuti dibagi jumlah peraturan Gubernur dalam tahun 2019 x 100%	Peraturan Gubernur tahun 2019 yang ditindaklanjuti	PerGub			
7	KETAATAN PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PADA PERATURAN PERUNDANG-	Perda yang dibatalkan	23	Jumlah PERDA yang dibatalkan	Jumlah Perda yang dibatalkan dibagi jumlah PERDA yang dikirim ke pemerintah untuk dievaluasi x 100%	PERDA yang dibatalkan	Perda	%	Biro Hukum	
						PERDA yang dikirimkan untuk dievaluasi oleh Pemerintah	Perda			
8	INTENSITAS DAN EFEKTIVITAS PROSES KONSULTASI PUBLIK ANTARA PEMDA DAN MASYARAKAT ATAS PENETAPAN KEBIJAKAN PUBLIK YANG STRATEGIS DAN RELEVAN UNTUK DAERAH	Perda tentang konsultasi publik	24	Keberadaan PERDA/PerGub tentang konsultasi publik	Ada/tidak PERDA / PerGub	ada/tidak ada PERDA/PerGub tentang konsultasi publik	Ada/tidak		Biro Hukum	
		Media informasi pemda yang dapat diakses oleh publik	25	Adanya media informasi pemda yang dapat diakses oleh publik (website Provinsi, pos, bag/biro humas, leaflet/brosur)	ada atau tidak ada media informasi yang ditetapkan dengan PerGub	1. Media Informasi yang dapat diakses oleh publik #1 2. Media Informasi yang dapat diakses oleh publik #2 3. Media Informasi yang dapat diakses oleh publik #3 4. Media Informasi yang dapat diakses oleh publik #4	Media informasi Media informasi Media informasi Media informasi			Dinas Kominfo
9	TRANSPARANSI DALAM PEMANFAATAN ALOKASI PENCAIRAN DAN PENYERAPAN DAU, DAK, DAN BAGI HASIL	Serapan dana perimbangan	26	dana perimbangan yang terserap dibanding yang direncanakan	Jumlah dana perimbangan yang terserap dibagi jumlah dana perimbangan x 100%	Dana perimbangan yang terserap Tahun 2019	Rp		Badan Keuangan Daerah	
		Alokasi belanja pada APBD dari DAU	27	Belanja Publik terhadap DAU	Jumlah belanja publik dibagi DAU x 100%	Dana perimbangan yang direncanakan sesuai dengan APBD tahun 2019	Rp			Badan Keuangan Daerah
		Alokasi belanja pada APBD	28	Belanja Publik terhadap total APBD	Total Belanja Langsung dibagi APBD x 100%	Belanja Langsung (Realisasi) DAU Tahun 2019	Rp			
10	INTENSITAS, EFEKTIVITAS DAN TRANSPARANSI PEMUNGUTAN SUMBER-SUMBER PAD DAN PINJAMAN / OBLIGASI DAERAH	Besaran Pendapatan Asli Daerah (PAD)	29	Besaran PAD terhadap seluruh pendapatan dlm APBD	Jumlah PAD dibagi jumlah total pendapatan APBD (realisasi) x 100%	PAD APBD (Realisasi) Tahun 2019	Rp		Badan Keuangan Daerah	
						Total Pendapatan dalam APBD (Realisasi) Tahun 2019	Rp			
11	EFEKTIVITAS PERENCANAAN, PENYUSUNAN, PELAKSANAAN TATA USAHA, PERTANGGUNG JAWABAN DAN PENGAWASAN APBD	Kewajaran Lapkeu	30	Opini BPK terhadap LapKeu Daerah	Jenis Opini BPK terhadap Hasil Laporan Keuangan Daerah untuk 2 tahun terakhir	Opini BPK atas Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2019 Opini BPK atas Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2018	WTP, WDP, TMP, TW WTP, WDP, TMP, TW		Inpektorat	
		Besaran SILPA	31	SILPA thdp total pendapatan	Besaran SILPA dibagi jumlah pendapatan x 100%	SILPA Tahun 2019	Rp			Badan Keuangan Daerah
		Realisasi PAD	32	Rasio realisasi PAD thd anggaran pendapatan	Realisasi PAD tahun 2019 dibagi anggaran pendapatan dalam APBD 2019 x 100%	Total Pendapatan dalam APBD (Realisasi) Tahun 2019	Rp		Badan Keuangan Daerah	
		Realisasi belanja	33	Realisasi belanja thd anggaran belanja	Realisasi belanja dibagi total anggaran belanja APBD X 100%	Realisasi PAD Tahun 2019	Rp			Badan Keuangan Daerah
		Pengawasan Inspektorat Daerah	34	Rasio Temuan BPK RI yang ditindaklanjuti	Jumlah temuan BPK RI yang ditindaklanjuti dibagi dengan temuan BPK RI sampai dengan akhir tahun 2018	Anggaran Pendapatan dalam APBD 2019	Rp		Inpektorat	
12	PENGELOLAAN POTENSI DAERAH	Peta potensi daerah	35	Rasio realisasi PAD 2018 terhadap potensi PAD	Jumlah realisasi PAD 2019 dibagi dengan potensi PAD	Realisasi PAD Tahun 2018	Rp			Badan Keuangan Daerah
		Peningkatan PAD	36	Peningkatan PAD	(PAD 2019 - PAD 2018) : PAD 2018 x 100%	Potensi PAD Pada tahun 2019	Rp		Badan Keuangan Daerah	
						Total PAD pada tahun 2019	Rp			
13	TEROBOSAN INOVASI BARU	Penghargaan	37	Penghargaan dari pemerintah yang diterima oleh Pemda dalam tahun 2019.	Jumlah penghargaan dari pemerintah yang diterima oleh Pemerintah Daerah dalam Tahun 2019	Jumlah penghargaan dari pemerintah yang diterima oleh Pemerintah Daerah dalam Tahun 2019	Penghargaan		Seluruh OPD	
		Pengadaan barang dan jasa	38	Keberadaan E-procurement	ada/tidak ada E-Procurement	Total PAD pada tahun 2018	Rp			Biro AP2BMD
		Daya saing daerah	39	Jumlah persetujuan investasi	Jumlah Ijin Investasi dalam tahun 2019	Persetujuan ijin Investasi pada Tahun 2019	Ada/tidak			

DATA PENDUKUNG ELEMEN DATA IKK PROVINSI
LAMPIRAN I.2 PELAKSANA KEBIJAKAN UMUM (DATA ISIAN SELURUH OPD)

Lampiran I.2 (OPD Yang Melaksanakan Satu Urusan)

Nama Perangkat Daerah : _____

Urusan Yang Dilaksanakan : _____

No	ASPEK	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2018)	Capaian Kinerja		Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA	1	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Jumlah Program Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Tuliskan Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis) dan Nilai Anggaran serta Realisasi nya	program	4 program	Berdasarkan Renstra dan DPA 2019
		2	Keberadaan <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP)	Jumlah Keberadaan SOP	Apabila ada, sebutkan ada sebanyak ___ yang terdiri dari:		...buah	Yang berlaku s.d. tahun 2019
					SOP #1	Jenis SOP		
					SOP #2	Jenis SOP		
SOP #3	Jenis SOP							
2	KETAATAN THD PERATURAN / UU	3	Keberadaan Peraturan (Perda/Perkada) yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	Ada atau tidak ada	Apabila ada, sebutkan:	Perda	ada/tidak	
3	PENATAAN KELEMBAGAAN	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	Jumlah jabatan yang ada	20 Jabatan	%	Keadaan 31 Desember 2019
					Jumlah jabatan yang harus ada	20 Jabatan		
		5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi OPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi OPD	Jumlah Jabatan Fungsional dalam struktur organisasi OPD	0 Jabatan	Keadaan 31 Desember 2019	
					1. Jabatan Fungsional #1	Jafung		
					2. Jabatan Fungsional #2	Jafung		
3. Jabatan Fungsional #3	Jafung							
4. Jabatan Fungsional #4	Jafung							
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN	6	Rasio PNS Provinsi	Jumlah PNS OPD terhadap Total PNS Provinsi	Jumlah PNS OPD	84 orang	%	Keadaan 31 Desember 2019
					Jumlah PNS Provinsi	... orang		
		7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat OPD yang ada x 100%	Jumlah Pejabat yang memenuhi persyaratan Diklatpim	12 orang	%	Keadaan 31 Desember 2019
					Jumlah pejabat OPD yang ada	20 orang		
		8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat OPD yang ada x 100%	Jumlah pejabat OPD yang memenuhi persyaratan kepangkatan	54 orang	%	Keadaan 31 Desember 2019
					Jumlah pejabat OPD yang ada	20 orang		
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN	9	Ada atau tidaknya dokumen perencanaan pembangunan di OPD	ada atau tidak ada dokumen perencanaan OPD berikut jumlahnya	Jumlah dokumen perencanaan yang ada	... dokumen	Tahun 2019	
					-RENSTRA-OPD	ada/tidak		
					-RENJA-OPD	ada/tidak		
					-RKA-OPD	ada/tidak		

5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA OPD	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam RENJA OPD dibagi jumlah program dalam RENJA OPD x 100%	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam Renja OPD	9 program	%	
					Jumlah program RENJA OPD	... program		
		11	Jumlah Program RENJA OPD yang diakomodir dalam RKA OPD	Jumlah program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA OPD dibagi jumlah program dalam RKA OPD x 100%	Jumlah program RENJA OPD yang diakomodir dalam RKA OPD	9 program	%	
					Jumlah Program dalam RKA OPD	... program		
		12	Jumlah Program RKA OPD yang diakomodir dalam DPA OPD	Jumlah program RKA OPD yang diakomodir dalam DPA OPD dibagi jumlah program dalam DPA OPD x 100%	Jumlah program RKA OPD yang diakomodir dalam DPA OPD	... program	%	
					Jumlah program dalam DPA OPD	... program		
6	LAPORAN KEUANGAN OPD	13	Anggaran OPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran OPD dibagi total APBD x 100%	Total anggaran OPD	Rp. 30.093.133.600,00	%	
					Total belanja APBD (anggaran)	Rp.....		
		14	Realisasi Belanja Perangkat Daerah terhadap total Realisasi Belanja APBD	Realisasi Belanja Perangkat Dearah dibagi total Realisasi Belanja APBD x 100%	Realisasi Belanja Langsung OPD	Rp. 20.809.556.615,26	72,42%	
					Total Realisasi Belanja OPD	Rp. 28.735.810.944,26		
		15	Total Belanja langsung dari total belanja OPD	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah x 100%	Total Belanja Pemeliharaan OPD	Rp. 51.743.750,00	0,28%	
					Total Belanja Barang dan Jasa OPD	Rp. 18.495.775.787,00		
		16	Total Belanja Tidak Langsung dari total belanja OPD	Total Belanja Tidak Langsung dibagi total belanja OPD x 100%	Realisasi belanja tidak langsung OPD	Rp. 7.926.254.793	28%	
					Total Belanja OPD	Rp. 28.735.810.944,26		
		17	Keberadaan laporan keuangan OPD (Neraca, LRA,Calk)	ada atau tidak ada laporan keuangan OPD berikut komponen yang ada (Neraca, LRA dan CALK)	Jumlah komponen laporan keuangan	komponen	3 Dokumen	
					- Neraca	ada/tidak		
- LRA	ada/tidak							
			- CALK	ada/tidak				
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK	18	Adanya inventarisasi barang / asset OPD	ada atau tidak ada inventarisasi barang / asset OPD	ada/tidak ada laporan inventarisasi barang/asset OPD 5 tahun terakhir	ada/tidak		BA Sensus Aset
		19	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh OPD	Jumlah asset yang tidak digunakan OPD dibagi total asset yang dikuasai OPD x 100%	Jumlah asset yang tidak digunakan OPD	Rp. 866.042.400,00	%	Yang dimaksud adalah aset yang berfungsi baik namun tidak digunakan
				Total Asset yang dikuasai OPD	Rp. 95.207.500.430,26			
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi :	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Jumlah fasilitas/prasarana informasi	buah	... Buah	
					1. Papan Pengumuman	ada/tidak		
					2. Pos Pengaduan	ada/tidak		
					3. Leaflet	ada/tidak		
					4. Mobil keliling	ada/tidak		
		5. Pengumuman di media massa	ada/tidak					
21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	ada atau tidak adanya hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	ada/tidak surat ketetapan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	ada/tidak			Survey yang dilaksanakan tahun 2019	

DATA PENDUKUNG ELEMEN DATA IKK PROVINSI
LAMPIRAN I.2 PELAKSANA KEBIJAKAN UMUM (DATA ISIAN SELURUH OPD)

Lampiran I.2 (OPD Yang Melaksanakan lebih dari satu urusan)

Nama Perangkat Daerah :
Urusan Yang Dilaksanakan :
1. Urusan _____
2. Urusan _____

No	ASPEK	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)		Capaian Kinerja				Keterangan
					Urusan (1) 6 (A)	Urusan (2) 6 (B)	Urusan (1)		Urusan (2)		
1	2	3	4	5	6 (A)	6 (B)	7 (A)	7 (B)	8 (A)	8 (B)	
1	KEBIJAKAN TEKNIK PENYELENGGARA	1	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Jumlah Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Sebutkan Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis) dan Nilai Anggaran serta Realisasi nya	Sebutkan Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis) dan Nilai Anggaran serta Realisasi nya	program	5 program	program	... program	Berdasarkan Renstra dan DPA 2019
		2	Keberadaan <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP)	Jumlah Keberadaan SOP	Apabila ada, sebutkan ada sebanyak ___ yang terdiri dari: SOP #1 SOP #2 SOP #3	Apabila ada, sebutkan ada sebanyak ___ yang terdiri dari: SOP #1 SOP #2 SOP #3		...buah		...buah	Yang berlaku s.d. tahun 2019
2	KETAATAN THD PERATURAN / UU	3	Keberadaan Peraturan (Perda/Perkada) yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	Ada atau tidak ada	Apabila ada, sebutkan:	Apabila ada, sebutkan: Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan	Perda 5/2017	ada/tidak	Perda 2	ada/tidak	
3	PENATAAN KELEMBAGAAN	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	Jumlah jabatan yang ada	Jumlah jabatan yang ada	20 Jabatan	% Jabatan	%	Keadaan 31 Desember 2019
		5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi OPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi OPD	Jumlah Jabatan Fungsional dalam struktur organisasi OPD 1. Jabatan Fungsional #1 2. Jabatan Fungsional #2 3. Jabatan Fungsional #3 4. Jabatan Fungsional #4	Jumlah Jabatan Fungsional dalam struktur organisasi OPD 1. Jabatan Fungsional #1 2. Jabatan Fungsional #2 3. Jabatan Fungsional #3 4. Jabatan Fungsional #4 Jabatan	 Jabatan		Keadaan 31 Desember 2019
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN	6	Rasio PNS Provinsi	Jumlah PNS OPD terhadap Total PNS Provinsi	Jumlah PNS OPD	Jumlah PNS OPD	84 orang	%	... orang	%	Keadaan 31 Desember 2019
		7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat OPD yang ada x 100%	Jumlah Pejabat yang memenuhi persyaratan Diklatpim	Jumlah Pejabat yang memenuhi persyaratan Diklatpim	12 orang	%	... orang	%	Keadaan 31 Desember 2019
		8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat OPD yang ada x 100%	Jumlah pejabat OPD yang memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat OPD yang memenuhi persyaratan kepangkatan	54 orang	%	... orang	%	Keadaan 31 Desember 2019
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN	9	Ada atau tidaknya dokumen perencanaan pembangunan di OPD -RENSTRA-OPD -RENJA-OPD -RKA-OPD	ada atau tidak ada dokumen perencanaan OPD berikut jumlahnya	Jumlah dokumen perencanaan yang ada	Jumlah dokumen perencanaan yang ada	... dokumen		... dokumen		Tahun 2019
		10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA OPD	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam RENJA OPD dibagi jumlah program dalam RENJA OPD x 100%	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam Renja OPD	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam Renja OPD	9 program	%	... program	%	
		11	Jumlah Program RENJA OPD yang diakomodir dalam RKA OPD	Jumlah program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA OPD dibagi jumlah program dalam RKA OPD x 100%	Jumlah program RENJA OPD yang diakomodir dalam RKA OPD	Jumlah program RENJA OPD yang diakomodir dalam RKA OPD	9 program	%	... program	%	
		12	Jumlah Program RKA OPD yang diakomodir dalam DPA OPD	Jumlah program RKA OPD yang diakomodir dalam DPA OPD dibagi jumlah program dalam DPA OPD x 100%	Jumlah program RKA OPD yang diakomodir dalam DPA OPD	Jumlah program RKA OPD yang diakomodir dalam DPA OPD	... program	%	... program	%	

6	LAPORAN KEUANGAN OPD	13	Anggaran OPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran OPD dibagi total APBD x 100%	Total anggaran OPD	Total anggaran OPD	Rp. 30.093.133.600	%	Rp	%	
					Total belanja APBD (anggaran)	Total belanja APBD (anggaran)	Rp		Rp		
		14	Realisasi Belanja Perangkat Daerah terhadap total Realisasi Belanja APBD	Realisasi Belanja Perangkat Daerah dibagi total Realisasi Belanja APBD x 100%	Realisasi Belanja Langsung OPD	Realisasi Belanja Langsung OPD	Rp. 20.809.556.151,26	72,42%	Rp	%	
					Total Realisasi Belanja OPD	Total Realisasi Belanja OPD	Rp.28.735.810.944,26		Rp		
		15	Total Belanja langsung dari total belanja OPD	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah x 100%	Total Belanja Pemeliharaan OPD	Total Belanja Pemeliharaan OPD	Rp. 51.743.750,00	0,28%	Rp	%	
				Total Belanja Barang dan Jasa OPD	Total Belanja Barang dan Jasa OPD	Rp. 18.495.775.787,00		Rp			
		16	Total Belanja Tidak Langsung dari total belanja OPD	Total Belanja Tidak Langsung dibagi total belanja OPD x 100%	Realisasi belanja tidak langsung OPD	Realisasi belanja tidak langsung OPD	Rp. 7.926.254.793,00	28%	Rp	%	
					Total Belanja OPD	Total Belanja OPD	Rp. 28.735.810.944,26		Rp		
		17	Keberadaan laporan keuangan OPD (Neraca, LRA, Calk)	ada atau tidak ada laporan keuangan OPD berikut komponen yang ada (Neraca, LRA dan CALK)	Jumlah komponen laporan keuangan	Jumlah komponen laporan keuangan	komponen	3 Dokumen	komponen	3 Dokumen	
					- Neraca	- Neraca	ada/tidak		ada/tidak		
					- LRA	- LRA	ada/tidak		ada/tidak		
					- CALK	- CALK	ada/tidak		ada/tidak		
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK	18	Adanya inventarisasi barang / asset OPD	ada atau tidak ada inventarisasi barang / asset OPD	ada/tidak ada laporan inventarisasi barang/asset OPD 5 tahun terakhir	ada/tidak ada laporan inventarisasi barang/asset OPD 5 tahun terakhir	ada/tidak		ada/tidak		BA Sensus Aset
		19	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh OPD	Jumlah asset yang tidak digunakan OPD dibagi total asset yang dikuasai OPD x 100%	Jumlah asset yang tidak digunakan OPD	Jumlah asset yang tidak digunakan OPD	Rp. 866.042.400	%	Rp	%	Yang dimaksud adalah aset yang berfungsi baik namun tidak digunakan
				Total Asset yang dikuasai OPD	Total Asset yang dikuasai OPD	Rp. 95.207.500.430,26		Rp			
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi :	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Jumlah fasilitas/prasarana informasi	Jumlah fasilitas/prasarana informasi	buah	... Buah	buah	... Buah	
			1. Papan Pengumuman		1. Papan Pengumuman	1. Papan Pengumuman	ada/tidak		ada/tidak		
			2. Pos Pengaduan		2. Pos Pengaduan	2. Pos Pengaduan	ada/tidak		ada/tidak		
			3. Leaflet		3. Leaflet	3. Leaflet	ada/tidak		ada/tidak		
			4. Mobil keliling		4. Mobil keliling	4. Mobil keliling	ada/tidak		ada/tidak		
		5. Pengumuman di media massa		5. Pengumuman di media massa	5. Pengumuman di media massa	ada/tidak		ada/tidak			
		21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	ada atau tidak adanya hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	ada/tidak surat ketetapan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	ada/tidak surat ketetapan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	ada/tidak		ada/tidak		Survey yang dilaksanakan tahun 2019

**ASPEK TINGKAT CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN WAJIB DAN URUSAN PILIHAN
LPPD PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2019**

LAMPIRAN I.3 CAPAIAN KINERJA

NO	URUSAN	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA	OPD PENANGGUNGJAWAB	KETERANGAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Pendidikan	1	Pendidikan Luar Biasa (PLB) jenjang SD/MI	Jumlah siswa penyandang ketunaan yang bersekolah di tingkat SD/MI Jumlah penduduk penyandang ketunaan di usia SD/MI	... orang × 100 % ... orang	... %	Dinas Pendidikan dan Dinas PPKBPS	Data bersumber dari Profil Pendidikan dan profil Kependudukan Tahun 2019	
		2	Pendidikan Luar Biasa (PLB) jenjang SMP/MTS	Jumlah siswa penyandang ketunaan yang bersekolah di tingkat SMP/MTS Jumlah penduduk penyandang ketunaan di usia SMP/MTS	... orang × 100 % ... orang	... %	Dinas Pendidikan dan Dinas PPKBPS	Data bersumber dari Profil Pendidikan dan profil Kependudukan Tahun 2019	
		3	Pendidikan Luar Biasa (PLB) jenjang SMA/SMK/MA	Jumlah siswa penyandang ketunaan yang bersekolah di tingkat SMA /SMK/MA Jumlah penduduk penyandang ketunaan di usia SMA/SMK/MA	... orang × 100 % ... orang	... %	Dinas Pendidikan dan Dinas PPKBPS	Data bersumber dari Profil Pendidikan dan profil Kependudukan Tahun 2019	
		4	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 16-18 Tahun yang berpartisipasi Dalam Pendidikan Menengah	Jumlah siswa usia 16-18 tahun dijenjang SMA/SMK Jumlah penduduk kelompok usia 16-18 th	... orang × 100 % ... orang	... %	Dinas Pendidikan dan Dinas PPKBPS	Data bersumber dari Profil Pendidikan dan profil Kependudukan Tahun 2019	
		5	Tingkat Partisipasi Warga Negara Perempuan Usia 16 – 18 Tahun dalam Pendidikan Menengah	Jumlah Siswa Perempuan Usia 16-18 Tahun dijenjang SMA/SMK Jumlah Penduduk Kelompok Usia 16 -18 Tahun	... orang × 100 % ... orang	... %	Dinas Pendidikan dan Dinas PPKBPS	Data bersumber dari Profil Pendidikan dan profil Kependudukan Tahun 2019	
		6	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	Jumlah lulusan pada jenjang SMA/SMK/MA Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMA/SMK/MA pada tahun ajaran sebelumnya	... orang × 100 % ... orang	... %	Dinas Pendidikan	Data bersumber dari Profil Pendidikan Tahun 2019	
		7	Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA	Jumlah putus sekolah pd tingkat & jenjang SMA/SMK/MA Jumlah siswa pd tingkat yang sama dan jenjang SMA/SMK/MA	... orang × 100 % ... orang	... %	Dinas Pendidikan	Data bersumber dari Profil Pendidikan Tahun 2019	
		8	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMA/SMK/MA Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs tahun ajaran sebelumnya	... orang × 100 % ... orang	... %	Dinas Pendidikan	Data bersumber dari Profil Pendidikan Tahun 2019	
		9	Tingkat Sekolah Jenjang SMA/SMK/MA berakreditasi A atau B SMA/SMK	Jumlah Sekolah Jenjang SMA/SMK/MA terakreditasi A/B Jumlah Sekolah Jenjang SMA/SMK/MA terakreditasi A/B	... sekolah × 100 % ... sekolah	... %	Dinas Pendidikan	Data bersumber dari Profil Pendidikan Tahun 2019	
		10	Pendidik Pada Pendidikan Khusus Yang Memiliki Ijazah Diploma Empat (D-IV) atau Sarjana (S1) dan Sertifikat Pendidik	Jumlah Pendidik Pada Jenjang Pendidikan Khusus yang Memiliki Ijazah minimal (D-IV) atau (S1) dan Sertifikat Pendidik Jumlah Guru jenjang SMP/MTS	... orang × 100 % ... orang	... %	Dinas Pendidikan	Data bersumber dari Profil Pendidikan Tahun 2019	
		11	Pendidik Pada Jenjang Menengah yang Memiliki Ijazah diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) dan Sertifikat Pendidik	Jumlah Pendidik Pada Jenjang Pendidikan Khusus yang Memiliki Ijazah minimal (D-IV) atau (S1) dan Sertifikat Pendidik Jumlah Guru jenjang SMA/SMK/MA	... orang × 100 % ... orang	... %	Dinas Pendidikan	Data bersumber dari Profil Pendidikan Tahun 2019	
		12	Jumlah Kepala Sekolah Pendidikan Khusus yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	Jumlah Kepala Sekolah Pada Jenjang Pendidikan Khusus yang Memiliki Ijazah minimal (D-IV) atau (S1), Sertifikat Pendidik, Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah Jumlah Kepala Sekolah jenjang Pendidikan Khusus	... orang × 100 % ... orang	... %	Dinas Pendidikan	Data bersumber dari Profil Pendidikan Tahun 2019	
		13	Jumlah Kepala Sekolah Pendidikan Menengah yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	Jumlah Kepala Sekolah Pada Jenjang Pendidikan Menengah yang Memiliki Ijazah minimal (D-IV) atau (S1), Sertifikat Pendidik, Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah Jumlah Kepala Sekolah jenjang Pendidikan Menengah	... orang × 100 % ... orang	... %	Dinas Pendidikan	Data bersumber dari Profil Pendidikan Tahun 2019	
2	Kesehatan	14	Rasio daya tampung rumah sakit rujukan	Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan di seluruh provinsi Jumlah Penduduk Provinsi	... orang × 100 % ... orang	... %	Dinas Kesehatan, RSAM, RSUD Pariaman, RSUD Solok dan RSJ HB Saanin		
		15	Persentase RS Rujukan Provinsi yang terakreditasi	Jumlah RS Rujukan Provinsi yang terakreditasi minimal Tingkat Utama Jumlah RS Provinsi	... RS × 100 % ... RS	... %	Dinas Kesehatan, RSAM, RSUD Pariaman, RSUD Solok dan RSJ HB Saanin		
		16	Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	Jumlah penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana yang mendapatkan pelayanan kesehatan dalam kurun waktu satu tahun Jumlah penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana dalam satu tahun yang sama	... orang × 100 % ... orang	... %	Dinas Kesehatan, BPBD		
		17	Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB Provinsi	Jumlah orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar Jumlah orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB	... orang × 100 % ... orang	... %	Dinas Kesehatan	Data bersumber dari Profil Kesehatan Tahun 2019	
		18	Rasio Tenaga Kesehatan terhadap Jumlah Penduduk Provinsi	Jumlah Tenaga Kesehatan Jumlah Penduduk Provinsi	... orang × 100 % ... orang	... %	Dinas Kesehatan		
		19	Cakupan ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota	... % 19 Kab/Kota	× 100 %	... %	Dinas Kesehatan	Data bersumber dari agregasi Kab/Kota
		20	Cakupan ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota	... % 19 Kab/Kota	× 100 %	... %	Dinas Kesehatan	Data bersumber dari agregasi Kab/Kota

NO	URUSAN	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA	OPD PENANGGUNGJAWAB	KETERANGAN	
1	2	3	5	6	7	8	
2	Kesehatan	4	5	6	7	8	
21	Kesehatan	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota	... %	... %	Dinas Kesehatan	Data bersumber dari agregasi Kab/Kota
			Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota	19 Kab/Kota			
		Cakupan Balita Gizi Buruk/Stunting yg mendapatkan Perawatan/Pelayanan Kesehatan	Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota	... %	... %	Dinas Kesehatan	Data bersumber dari agregasi Kab/Kota
			Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota	19 Kab/Kota			
		Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota	... %	... %	Dinas Kesehatan	Data bersumber dari agregasi Kab/Kota
			Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota	19 Kab/Kota			
		Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota	... %	... %	Dinas Kesehatan	Data bersumber dari agregasi Kab/Kota
			Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota	19 Kab/Kota			
		Cakupan bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota	... %	... %	Dinas Kesehatan	Data bersumber dari agregasi Kab/Kota
			Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota	19 Kab/Kota			
		Cakupan orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota	... %	... %	Dinas Kesehatan	Data bersumber dari agregasi Kab/Kota
			Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota	19 Kab/Kota			
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota	... %	... %	Dinas Kesehatan	Data bersumber dari agregasi Kab/Kota
			Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota	19 Kab/Kota			
Cakupan Orang Dengan Gangguan Jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota	... %	... %	Dinas Kesehatan	Data bersumber dari agregasi Kab/Kota		
	Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota	19 Kab/Kota				$\times 100 \%$	
Cakupan penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota	... %	... %	Dinas Kesehatan	Data bersumber dari agregasi Kab/Kota		
	Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota	19 Kab/Kota				$\times 100 \%$	
Cakupan penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota	... %	... %	Dinas Kesehatan	Data bersumber dari agregasi Kab/Kota		
	Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota	19 Kab/Kota				$\times 100 \%$	
Cakupan anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota	... %	... %	Dinas Kesehatan	Data bersumber dari agregasi Kab/Kota		
	Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota	19 Kab/Kota				$\times 100 \%$	
Cakupan orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota	... %	... %	Dinas Kesehatan	Data bersumber dari agregasi Kab/Kota		
	Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota	19 Kab/Kota				$\times 100 \%$	
Cakupan warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota	... %	... %	Dinas Kesehatan	Data bersumber dari agregasi Kab/Kota		
	Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota	19 Kab/Kota				$\times 100 \%$	
Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup	Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota	... %	... %	Dinas Kesehatan	Data bersumber dari agregasi Kab/Kota		
	Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota	19 Kab/Kota				$\times 100 \%$	
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jalan Provinsi dalam kondisi Baik	Panjang jalan Provinsi dalam kondisi baik	... Km	... %	Dinas PU dan PR	
			Panjang seluruh jalan provinsi	... Km			
		Presentase Panjang Jalan Provinsi yang di rehabilitasi/direkonstruksi	Panjang jalan Provinsi yang direhabilitasi/direkonstruksi	... Km	... %	Dinas PU dan PR	
			Panjang Jalan Provinsi yang seharusnya direhabilitasi/direkonstruksi	... Km			
		Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di Wilayah Sungai (WS) Kewenangan Provinsi (ha)	... ha	... %	Dinas Perkimtan dan Dinas PSDA	
			Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS Kewenangan Provinsi (ha)	... ha			
		Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di Wilayah Sungai (WS) Kewenangan Provinsi	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di Wilayah Sungai (WS) Kewenangan Provinsi (ha)	... ha	... %	Dinas Perkimtan dan Dinas PSDA	
			Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di WS Kewenangan Provinsi (ha)	... ha			
		Rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi	Luas irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasikan dan pelihara (ha) di tahun eksisting	... ha	... %	Dinas Perkimtan dan Dinas PSDA	
			luas daerah irigasi kewenangan provinsi	... ha			
		Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kab /kota	Jumlah kumulatif kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota	... %	... %	Dinas PU dan PR	
			Jumlah kumulatif kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/ kota di provinsi bersangkutan.	... %			
		Ketersediaan Sistem Pengolah Air Limbah Domestik (SPALD)	Ada atau tidaknya Sistem Pengolah Air Limbah Domestik (SPALD)	Ada/tidak	... %	Dinas PU dan PR	
			Total volume limbah yang masuk dalam SPAL Domestik Regional	... m3			
Rasio pelayanan pengolahan limbah domestik oleh SPAL Regional	Total kapasitas pengolahan limbah SPAL Domestik Regional	... m3	... %	Dinas PU dan PR			
	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah Provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli	... orang				$\times 100 \%$	
Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli	jumlah kebutuhan tenaga ahli di wilayah provinsi	... orang	... %	Dinas PU dan PR, Dinas Perkimtan, Dinas PSDA			
	Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota	... %				$\times 100 \%$	
Rumah Tangga Bersanitasi	Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota	... %	... %	Dinas Perkimtan	Data bersumber dari agregasi Kab/Kota		
	Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota	19 Kab/Kota				$\times 100 \%$	

NO	URUSAN	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA	OPD PENANGGUNGJAWAB	KETERANGAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		45	Rumah Tangga Pengguna air bersih	Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota ... % Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota 19 Kab/Kota	... % x 100 %	... %	Dinas Perkimtan	Data bersumber dari agregasi Kab/Kota
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	46	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n ... unit Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n ... unit	... unit x 100 %	... %	Dinas Perkimtan dan BPBD	
		47	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	Rumah Tangga Penerima Fasilitas Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan + Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa + Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni ... unit Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan ... unit	... unit x 100 %	... %	Dinas Perkimtan dan BPBD	
		48	Persentase Luas kawasan kumuh 10 – 15 Ha yang ditangani	Luas kawasan kumuh 10 – 15 Ha yang ditangani ... ha Luas kawasan kumuh 10-15 Ha ... ha	... ha x 100 %	... %	Dinas Perkimtan	
		49	Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU	Jumlah satuan perumahan yang sedang dibangun terfasilitasi PSU ... perumahan Jumlah satuan perumahan ... perumahan	... perumahan x 100 %	... %	Dinas Perkimtan	
		50	Rumah layak huni	Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota ... % Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota 19 Kab/Kota	... % x 100 %	... %	Dinas Perkimtan	Data bersumber dari agregasi Kab/Kota
		51	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Jumlah pengaduan yang diselesaikan ... Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk x 100 %	... %	Dinas Satpol PP	
5	Trantibumlinmas	52	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Jumlah Perda/Perkadayang memuat sanksi yang ditegakkan ... Perda Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada Pergub yang memuat sanksi ... Perda	... Perda x 100 %	... %	Dinas Satpol PP	
		53	Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal	Kemajuan pekerjaan dokumen kebencanaan yang disusun ... dokumen Jumlah dokumen kebencanaan yang akan disusun ... dokumen	... dokumen x 100 %	... %	Dinas Satpol PP	
		54	Persentase penanganan pra bencana	Jumlah kabupaten/kota yang terfasilitasi dalam penanganan pra bencana ... Kab/Kota Jumlah kabupaten/kota di wilayah Provinsi 19 Kab/Kota	... Kab/Kota x 100 %	... %	BPBD	Data bersumber dari agregasi Kab/Kota
		55	Persentase penanganan tanggap darurat bencana	Jumlah kabupaten/kota yang terfasilitasi dalam penanganan tanggap darurat bencana ... Kab/Kota Jumlah kabupaten/kota di wilayah provinsi yang mengalami bencana ... Kab/Kota	... Kab/Kota x 100 %	... %	BPBD	
		56	Persentase Personil Satpol PP berkualitas PPNS	Jumlah Personil Satpol PP Berkualitas PPNS ... Orang Jumlah Personil Satpol PP ... Orang	... Orang x 100 %	... %	Dinas Satpol PP	
		6	Sosial	57	Persentase penyandang disabilitas terlanter yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	Jumlah Anak Terlanter di dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya ... Orang Populasi Anak Terlanter di daerah provinsi yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti ... Orang	... Orang x 100 %	... %
58	Persentase Anak Terlanter yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti			Jumlah Anak Terlanter di dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya ... Orang Populasi Anak Terlanter di daerah provinsi yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti ... Orang	... Orang x 100 %	... %	Dinas Sosial	
59	Persentase lanjut usia terlanter yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti			Jumlah Lanjut Usia Terlanter di dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya ... Orang Populasi Lanjut Usia Terlanter di daerah provinsi yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti ... Orang	... Orang x 100 %	... %	Dinas Sosial	
60	Persentase Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti			Jumlah Gelandangan dan Pengemis di dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya ... Orang Populasi Gelandangan dan Pengemis Terlanter di daerah provinsi yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti ... Orang	... Orang x 100 %	... %	Dinas Sosial	
61	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi			Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya ... Orang Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah provinsi yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah provinsi ... Orang	... Orang x 100 %	... %	Dinas Sosial	
62	Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang disediakan di dalam panti			Jumlah Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang disediakan di dalam panti ... Orang x 100 %	... Orang	... %	Dinas Sosial	
63	Tenaga kesehatan (dokter, psikiater, peksos medis) yang disediakan di dalam panti			Jumlah tenaga kesehatan (dokter, psikiater, peksos medis) yang disediakan di dalam panti ... Orang	... Orang			
7	Ketenagakerjaan	64	Persentase Kabupaten/Kota yang menyusun rencana tenaga kerja.	Jumlah Kabupaten/Kota yang menyusun rencana tenaga kerja ... Kab/Kota Jumlah Kabupaten/Kota ... Kab/Kota	... Kab/Kota x 100 %	... %	Dinas Nakertrans	
		65	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi ... Orang Jumlah tenaga kerja keseluruhan ... Orang	... Orang x 100 %	... %	Dinas Nakertrans	
		66	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan) ... Jumlah tenaga kerja ... Orang	... x 100 %	... %	Dinas Nakertrans	
		67	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	Jumlah Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak ... Jumlah Perusahaan ... x 100 %	... x 100 %	... %	Dinas Nakertrans	

NO	URUSAN	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA	OPD PENANGGUNGJAWAB	KETERANGAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	Ketenagakerjaan	68	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi	Jumlah pencaker (pencari kerja) yang ditempatkan ... Orang	$\times 100 \%$...	Dinas Nakertrans	
				Jumlah pencaker yang terdaftar	... Orang			
		69	Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan	Total perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan ketenagakerjaan pada tahun 2019	$\times 100 \%$...	Dinas Nakertrans	
				Total perusahaan yang terdaftar melalui mekanisme wajib lapor ketenagakerjaan pada tahun 2019				
70	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial		Jumlah Perselisihan Hubungan Industrial yang diselesaikan Melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial	$\times 100 \%$...	Dinas Nakertrans		
			Jumlah Perselisihan Hubungan Industrial					
71	Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) yang mendapatkan izin dari Pemerintah Provinsi.		Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) yang mendapatkan izin dari pemerintah Provinsi	$\times 100 \%$...	Dinas Nakertrans		
			Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta					
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	72	Persentase ARG (Anggaran Responsif Gender) pada belanja langsung APBD	Jumlah ARG pada belanja langsung APBD Rp	$\times 100 \%$...	Dinas PP dan PA	
				Jumlah seluruh anggaran belanja langsung di Provinsi Rp				
		73	Rasio kekerasan terhadap anak per 10.000 anak	Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat provinsi yang didampingi ... Orang	$\times 100 \%$...	Dinas PP dan PA	
				Jumlah Anak (Penduduk usia Kurang dari 18 tahun) ... Orang				
		74	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan ... Orang	$\times 100 \%$...	Dinas PP dan PA	
		Jumlah penduduk perempuan ... Orang						
75	Partisipasi angkatan kerja perempuan		Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota ... %	$\times 100 \%$...	Dinas PP dan PA	Data bersumber dari agregasi Kab/Kota	
			Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota 19 Kab/Kota					
9	Pangan	76	Persentase cadangan pangan	Jumlah cadangan pangan provinsi	$\times 100 \%$...	Dinas Pangan	
				Jumlah kebutuhan pangan provinsi				
77	Infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	Tersedianya infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan				Dinas Pangan		
10	Pertanahan	78	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	Luas tanah sesuai peruntukan ijin lokasi ... ha	$\times 100 \%$...	Dinas Perkimtan	
				Seluruh luas tanah yang diberikan ijin lokasi ... ha				
		79	Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu	Luas pengadaan tanah untuk kepentingan umum selesai tepat waktu ... ha	$\times 100 \%$...	Dinas Perkimtan	
				Luas pengadaan tanah untuk kepentingan umum ... ha				
		80	Tersedianya Lokasi Pembangunan lintas Kabupaten/Kota.	Luas pemanfaatan adalah luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukkannya diatas izin lokasi lintas kab/ kota ... ha	$\times 100 \%$...	Dinas Perkimtan	
		Luas izin lokasi yang diterbitkan ... ha						
81	Luas lahan bersertifikat		Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota ... %	$\times 100 \%$...	Dinas Perkimtan dan Biro AP2BMD	Data bersumber dari agregasi Kab/Kota	
			Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota 19 Kab/Kota					
11	Lingkungan Hidup	82	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi				Dinas Lingkungan Hidup	
		83	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan, dan izin PPLH yang diterbitkan Pemerintah Provinsi ... orang	$\times 100 \%$...	Dinas Lingkungan Hidup	
				Usaha dan/atau kegiatan dilakukan pemeriksaan ... usaha				
		84	Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di provinsi terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH provinsi	Jumlah Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Provinsi ... orang	$\times 100 \%$...	Dinas Lingkungan Hidup	
				Usaha yang izin Lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi ... izin				
		85	Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota ... %	$\times 100 \%$...	Dinas Lingkungan Hidup	Data bersumber dari agregasi Kab/Kota
		Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota 19 Kab/Kota						
86	Penegakan hukum lingkungan		Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota ... %	$\times 100 \%$...	Dinas Lingkungan Hidup	Data bersumber dari agregasi Kab/Kota	
			Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota 19 Kab/Kota					
12	Administrasi Kependudukan & Catatan Sipil	87	Persentase penduduk yang telah melakukan perekaman	Jumlah penduduk yang sudah melakukan perekaman ... orang	$\times 100 \%$...	Dinas PPKBPS	
				Jumlah penduduk ... orang				
88	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran bagi anak usia 0 - 18 tahun		Jumlah anak (0-18 tahun) yang sudah memiliki akta kelahiran ... orang	$\times 100 \%$...	Dinas PPKBPS		
			Jumlah anak 0-18 tahun ... orang					
13	Pemberdayaan Masyarakat & Desa	89	Persentase pengentasan desa tertinggal	Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun ... Desa	$\times 100 \%$...	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
			Jumlah desa tertinggal (per-awal tahun 2019) ... Desa					

NO	URUSAN		IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA	OPD PENANGGUNGJAWAB	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		90	Persentase peningkatan status desa mandiri	Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun Jumlah desa berkembang (per-awal tahun 2019)	$\frac{\dots \text{ Desa}}{\dots \text{ Desa}} \times 100 \%$... %	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	91	TFR (Angka Kelahiran Total)				Dinas PPKBKS
		92	Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)				Dinas PPKBPS
		93	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Jumlah peserta KB Aktif Modern Jumlah Pasangan Usia Subur	$\frac{\dots \text{ orang}}{\dots \text{ orang}} \times 100 \%$... %	Dinas PPKBPS
		94	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani Jumlah Pasangan Usia Subur	$\frac{\dots \text{ orang}}{\dots \text{ orang}} \times 100 \%$... %	Dinas PPKBPS
15	Perhubungan	95	Rasio konektivitas Provinsi	Rasio konektivitas Provinsi = (IK1 x bobot angkutan jalan) + (IK2 x Bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan) o IK1 (angkutan jalan) = (Jumlah trayek yg dilayani pd provinsi x bobot trayek) dibagi jumlah kebutuhan trayek pada provinsi tersebut). o IK2 (Angkutan Sungai, danau dan penyeberangan) = jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi pd provinsi tsb x bobot lintas) dibagi (jumlah kebutuhan lintas penyeberangan pada provinsi tersebut)			Dinas Perhubungan
		96	Kinerja lalu lintas provinsi	V/C Ratio di Jalan Provinsi			
16	Komunikasi & Informatika	97	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Jumlah OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo Jumlah OPD	$\frac{\dots \text{ OPD}}{\dots \text{ OPD}} \times 100 \%$... %	Dinas Kominfo
		98	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Jumlah Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi Jumlah Layanan Publik	$\frac{\dots}{\dots} \times 100 \%$... %	Dinas Kominfo
		99	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi	Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi Jumlah penduduk	$\frac{\dots \text{ orang}}{\dots \text{ orang}} \times 100 \%$... %	Dinas Kominfo
		100	Peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government	Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government	ada/tidak		Dinas Kominfo
		101	Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	Jumlah ASN Pengelola TIK yang tersertifikasi Kompetensi Jumlah ASN Pengelola TIK yang seharusnya tersertifikasi Kompetensi	$\frac{\dots \text{ orang}}{\dots \text{ orang}} \times 100 \%$... %	Dinas Kominfo
17	Koperasi & UKM	102	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	Jumlah koperasi yang meningkatkan kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha Jumlah seluruh koperasi	$\frac{\dots \text{ koperasi}}{\dots \text{ koperasi}} \times 100 \%$... %	Dinans Koperasi dan UMKM
		103	Meningkatnya Usaha Kecil yang menjadi wirausaha	Jumlah usaha kecil yang menjadi wirausaha Jumlah usaha kecil keseluruhan	$\frac{\dots}{\dots} \times 100 \%$... %	Dinans Koperasi dan UMKM
		104	Persentase jumlah usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	Jumlah usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha Jumlah usaha kecil keseluruhan	$\frac{\dots}{\dots} \times 100 \%$... %	Dinans Koperasi dan UMKM
		105	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang mengikuti Pelatihan untuk Koperasi Jumlah Koperasi seharusnya mengikuti Pelatihan untuk Koperasi dalam 1 Provinsi	$\frac{\dots \text{ koperasi}}{\dots \text{ koperasi}} \times 100 \%$... %	Dinans Koperasi dan UMKM
		106	Koperasi aktif	Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota	$\frac{\dots \%}{19 \text{ Kab/Kota}} \times 100 \%$... %	Dinans Koperasi dan UMKM
18	Penanaman Modal	107	Persentase peningkatan investasi di provinsi	(Jumlah investasi tahun 2019 - jumlah investasi tahun 2018) di provinsi Jumlah investasi tahun 2018	$\frac{\dots}{\dots} \times 100 \%$... %	Dinas PMPTSP
19	Kepemudaan & Olahraga	108	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang berwirausaha di provinsi Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di provinsi	$\frac{14.736 \text{ orang}}{1.404.209 \text{ orang}} \times 100 \%$	1.05 %	Dinas Pemuda dan Olahraga
		109	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yg menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di provinsi jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di provinsi	$\frac{25.673 \text{ orang}}{1.404.209 \text{ orang}} \times 100 \%$	1.83 %	Dinas Pemuda dan Olahraga
		110	Peningkatan prestasi olahraga	Jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional	16 Emas 10 Perak 16 Perunggu	16 Emas 10 Perak 16 Perunggu	Dinas Pemuda dan Olahraga
		111	Presentase Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan	Jumlah Pelatih Olah Raga yang Memiliki Kompetensi di satuan Pendidikan jumlah Pelatih Olah Raga yang seharusnya Memiliki Kompetensi	$\frac{400 \text{ orang}}{2047 \text{ orang}} \times 100 \%$	19.54 %	Dinas Pemuda dan Olahraga

NO	URUSAN	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA	OPD PENANGGUNGJAWAB	KETERANGAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Statistik	112	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah jumlah OPD	$\frac{\dots \text{ OPD}}{\dots \text{ OPD}} \times 100 \%$...	Dinas Kominfo dan Bappeda	
		113	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah jumlah OPD	$\frac{\dots \text{ OPD}}{\dots \text{ OPD}} \times 100 \%$...	Dinas Kominfo dan Bappeda	
21	Persandian	114	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Jumlah nilai per area keamanan informasi Jumlah area penilaian	$\frac{\dots}{\dots} \times 100 \%$...	Dinas Kominfo	
22	Kebudayaan	115	Terlestarikannya Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan Jumlah cagar budaya yang ditetapkan	$\frac{\dots}{\dots} \times 100 \%$...	Dinas Kebudayaan	
		116	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	... Kali	... Kali	Dinas Kebudayaan	
23	Perpustakaan	117	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat		$\dots \times 100 \%$...	Dinas Perpustakaan dan Arsip	
		118	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat				Dinas Perpustakaan dan Arsip	
		119	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Jumlah koleksi judul buku yang tersedia di perpustakaan daerah Jumlah koleksi jumlah buku yang tersedia di perpustakaan daerah	$\frac{\dots \text{ buku}}{\dots \text{ buku}} \times 100 \%$...	Dinas Perpustakaan dan Arsip	
24	Kearsipan	120	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional)Ps40 dan 59 U 43/2009)	$T = (a + i + s + j)/4$ T= tingkat ketersediaan arsip a = persentase arsip aktif yg telah dibuatkan daftar arsip i = persentase arsip inaktif yg telah dibuatkan daftar arsip s = persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik j = persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN%	...	Dinas Perpustakaan dan Arsip	
		121	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepinginan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	$T = (m + b + g + a + c + i)/6$ T= tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban m = tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK b = tingkat kesesuaian kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana dengan NSPK g = tingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip perangkat daerah provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan dan pemekaran Daerah Kabupaten/Kota dengan NSPK a = tingkat kesesuaian kegiatan autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media dengan NSPK c = tingkat kesesuaian kegiatan pencarian arsip statis dengan NSPK i = tingkat kesesuaian kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan NSPK	Dinas Perpustakaan dan Arsip	
		122	Pengelolaan Arsip secara baku	Jumlah Perangkat Daerah yang telah menerapkan arsip secara baku Jumlah Perangkat Daerah	$\frac{\dots \text{ OPD}}{\dots \text{ OPD}} \times 100 \%$...	Dinas Perpustakaan dan Arsip	
25	Kelautan & perikanan	123	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi (sumber data: one data KKP)	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi (sumber data: one data KKP)			Dinas Kelautan dan Perikanan	
		124	Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	Keterangan: x: Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku c_i: jumlah pelaku usaha KP yang patuh s_i: jumlah sampel pelaku usaha KP yang diperiksa i: jenis komponen pelaku usaha KP n: jumlah komponen pelaku usaha KP			Dinas Kelautan dan Perikanan	
		125	Ekspor Hasil perikanan	Nilai export hasil perikanan (Rp) Target Daerah	$\frac{\text{Rp } \dots}{\text{Rp } \dots} \times 100 \%$...	Dinas Kelautan dan Perikanan	
		126	Konsumsi ikan	Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota	$\frac{\dots}{19 \text{ Kab/Kota}} \times 100 \%$...	Dinas Kelautan dan Perikanan	
26	Pariwisata	127	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	(Jumlah wisatawan tahun 2019 – Jumlah wisatawan tahun 2018) Jumlah wisatawan tahun 2018	$\frac{\text{Wisatawan}}{\text{Wisatawan}} \times 100 \%$...	Dinas Pariwisata	
		128	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke provinsi	(Jumlah wisatawan tahun 2019 – Jumlah wisatawan tahun 2018) Jumlah wisatawan tahun 2018	$\frac{\text{Wisatawan}}{\text{Wisatawan}} \times 100 \%$...	Dinas Pariwisata	
		129	Tingkat hunian akomodasi	Jumlah kamar yang terjual Jumlah kamar yang tersedia	$\frac{\dots \text{ kamar}}{\dots \text{ kamar}} \times 100 \%$...	Dinas Pariwisata	
		130	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor pariwisata Jumlah total PDRB	$\frac{\dots}{\dots} \times 100 \%$...	Dinas Pariwisata	
27	Pertanian	131	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Jumlah produksi pertanian pangan per hektar per tahun Luas panen	$\frac{\dots \text{ ton}}{\dots \text{ ha}} \times 100 \%$...	Dinas Pertanian	
		132	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	Jumlah kejadian penyakit/kasus tahun 2019 – jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya 2018 Jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya 2018	$\frac{\dots \text{ kasus}}{\dots \text{ kasus}} \times 100 \%$...	Dinas Pertanian	
		133	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	Jumlah kontribusi PDRB dari sektor Pertanian Jumlah total PDRB	$\frac{\dots}{\dots} \times 100 \%$...	Dinas Pertanian	

NO	URUSAN	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA	OPD PENANGGUNGJAWAB	KETERANGAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
28	Kehutanan	134	Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial	Jumlah Kelompok Tani Hutan (KTH) yg diberikan akses legal jumlah total usulan KTH yang terintegrasi × 100 %	... %	Dinas Kehutanan		
		135	Persentase kerusakan hutan pertahun (deforestasi)	Jumlah hutan yang rusak Jumlah hutan keseluruhan	... ha ... ha	... × 100 %	... %	Dinas Kehutanan	
		136	Persentase Luas lahan kritis yang direhabilitasi	Luas lahan kritis di provinsi yang direhabilitasi (ha) Luas Lahan Kritis di provinsi (ha)	... ha ... ha	... × 100 %	... %	Dinas Kehutanan	
29	Energi dan SDM	137	Persentase Usaha Tambang Sesuai Kewenangan Provinsi yang Tidak Melanggar Perda	Jumlah usaha tambang yang sesuai kewenangan Provinsi yang tidak melanggar Perda jumlah usaha tambang sesuai kewenangan Provinsi × 100 %	... %	Dinas ESDM	
		138	Persentase Desa Yang Teraliri Listrik	Jumlah Nagari yang teraliri listrik Jumlah Nagari	... Nagari ... Nagari	... × 100 %	... %	Dinas ESDM dan Biro Pemerintahan	
		139	Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB	Jumlah kontribusi PDRB dari sektor Pertambangan Jumlah total PDRB × 100 %	... %	Dinas ESDM	
		140	PERDA/PERGUB terkait izin penggalian, pemakaian dan izin pengusahaan air tanah dalam area provinsi		... Perda/Pergub	... Perda/Pergub	Dinas ESDM
30	Perdagangan	141	Pertumbuhan nilai ekspor non migas	Nilai ekspor non migas tahun berjalan – nilai ekspor non migas tahun sebelumnya Nilai ekspor non migas tahun sebelumnya	Rp Rp × 100 %	... %	Dinas Perindag	
		142	Persentase penanganan pengaduan konsumen	Jumlah pengaduan konsumen yang ditangani dan diselesaikan Dinas Provinsi dan BPSK sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam tahun berjalan Jumlah pengaduan konsumen yang diterimadalam tahun berjalan × 100 %	... %	Dinas Perindag	
		143	Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku	Jumlah sampel yang sesuai ketentuan Jumlah sampel yang diuji dalam satu tahun × 100 %	... %	Dinas Perindag	
		144	Tertib Usaha	Jumlah pelaku usaha yang memiliki SIUP MB TBB Jumlah pelaku usaha MB TBB × 100 %	... %	Dinas Perindag	
		145	Persentase kinerja realisasi pupuk	Realisasi RDKK × 100 %	... %	Dinas Perindag	
		146	Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Jumlah barang beredar yang diawasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Jumlah barang beredar yang diawasi × 100 %	... %	Dinas Perindag	
		147	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	$KVpt = \frac{t}{P} \times \frac{Sn}{Sn} = 100\%$ KVpt = Koefisien Variasi harga barang kebutuhan pokok antar waktu Sn = Standar deviasi harga rata-rata provinsi selama bulan Januari s.d Desember P = rata-rata harga provinsi barang kebutuhan pokok selama bulan Januari s.d Desember%			Dinas Perindag	
		148	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	Jumlah kontribusi PDRB dari sektor Perdagangan Jumlah total PDRB	Rp Rp × 100 %	... %	Dinas Perindag	
31	Perindustrian	149	Pertambahan jumlah industri besar di provinsi	(Jumlah Industri besar tahun 2019 - Jumlah industri besar tahun 2018) Jumlah total PDRB	Rp Rp × 100 %	... %	Dinas Perindag	
		150	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin Usaha Industri (IUI) Besar	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan Jumlah izin yang dikeluarkan	... izin ... izin	... × 100 %	... %	Dinas Perindag	
		151	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan	... izin		... izin	Dinas Perindag	
		152	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin perluasan Industri (IPI) bagi Industri Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan Jumlah izin yang dikeluarkan	... izin ... izin	... × 100 %	... %	Dinas Perindag	
		153	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan Jumlah izin yang dikeluarkan	... izin ... izin	... × 100 %	... %	Dinas Perindag	
		154	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	tersedianya informasi industri dengan batas waktu 0-6 bulan tersedianya informasi industri dengan batas waktu 7-12 bulan informasi produksi dan kapasitas produksi informasi bahan baku dan bahan penolong informasi bahan bakar/ energi informasi tenaga kerja informasi investasi			Dinas Perindag	
		155	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor industri Jumlah total PDRB	Rp Rp × 100 %	... %	Dinas Perindag	

NO	URUSAN	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA	OPD PENANGGUNGJAWAB	KETERANGAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan								
		1	Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan Provinsi	Menunjukkan jumlah Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan Provinsi	Dinas Kominfo	
		2	Penjabaran program RPJMD dalam RKPD	Penjabaran program RPJMD dalam RKPD %	Bappeda	
				Jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan tahun berkenaan	...			
		3	Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	Jumlah belanja pegawai diluar guru dan tenaga kesehatan	Rp × 100 %	... %	Bakeuda	
				Jumlah APBD	Rp			
		4	Rasio PAD	Jumlah PAD	Rp × 100 %	... %	Bakeuda	
				Jumlah PDRB non migas	Rp			
		5	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	Jumlah belanja urusan pemerintahan – transfer expenditures	Rp × 100 %	... %	Bakeuda	
				Jumlah belanja APBD	Rp			
		6	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas SPIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	Inspektorat	
		7	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Tingkat Kualitas APIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	Inspektorat	
		8	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya, yang ditandatangani pada kuartal pertama	Jumlah kontrak infrastruktur dengan nilai besar yang perlu pembangunan dalam 3 kuartal yang ditandatangani pada kuartal pertama tahun 2019	ha × 100 %	... %	Biro AP2BMD	
				Jumlah kontrak keseluruhan tahun 2019	ha			
		9	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	Jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	PDRB × 100 %	... %	Bakeuda dan Biro AP2BMD	
				Jumlah pengadaan yang dilakukan tanpa metode kompetitif	PDRB			
		10	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Jumlah nilai belanja langsung yang melalui pengadaan	Rp × 100 %	... %	Bakeuda	
				Total belanja langsung	Rp			
		11	Persentase Pegawai Fungsional terhadap Seluruh Jumlah Pegawai Pemerintah daerah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai PNS fungsional (diluar guru dan tenaga kesehatan)	... orang × 100 %	... %	BKD	
				Seluruh jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	... orang			
		12	Persentase Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai Fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi	... orang × 100 %	... %	BKD	
				Seluruh jumlah pegawai non Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	... orang			
		13	Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	Nilai absolut dari Total belanja dalam realisasi	Rp × 100 %	... %	Bakeuda	
				Total belanja APBD dikurangi satu	Rp			
		14	Assets management	1. Apakah ada daftar asset tetap? (Ya/Tidak) 2. Apakah ada manual untuk menyusun daftar asset tetap? (Ya/Tidak) 3. Apakah ada proses inventarisasi asset tahunan? (Ya/Tidak) Apakah nilai asset tercantum dalam laporan anggaran? (Ya/Tidak);	Ya/Tidak		Biro AP2BMD	
		15	Cash Management: Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	Nilai Realisasi SiLPA	Rp × 100 %	... %	Bakeuda	
				Total Belanja Anggaran tahun sebelumnya	Rp			
		16	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units)	Anggaran belanja untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda	Rp × 100 %	... %	Dinas Kominfo	
				Realisasi belanja untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda	Rp			
		17	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information)	Jumlah dokumen yang dipublikasikan di website Pemda × 100 %	... %	Dinas Kominfo dan Bakeuda	
				total jumlah dokumen yang telah dirinci			
Urusan Pemerintahan Umum								
		1	Kegiatan pembinaan politik di daerah	Menunjukkan jumlah kegiatan pembinaan politik	Jumlah	... kegiatan	Badan Kesbangpol	
		2	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, ORMAS dan OKP	Menunjukkan jumlah kegiatan pembinaan terhadap LSM, ORMAS dan OKP	Jumlah	... kegiatan	Badan Kesbangpol	

DATA PENDUKUNG ELEMEN DATA IKK PROVINSI
LAMPIRAN I.2 PELAKSANA KEBIJAKAN UMUM (DATA ISIAN PER SKPD)

NO	IKK	ELEMEN DATA	SATUAN	ELEMEN DATA DLM LPPD	DOKUMEN PENDUKUNG/KERTAS KERJA	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7
1	Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah program nasional yang dilaksanakan Perangkat Daerah	program	yang ada pada lampiran LPPD	FC halaman muka (cover) dan halaman dari DPA SKPD yang menunjukkan program nasional yang dilaksanakan oleh SKPD	Masing-masing SKPD
		Jumlah program nasional (RKP)	program		<i>Given</i>	
2	Keberadaan <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP)	Jumlah SOP	...buah			Masing-masing SKPD
		SOP #1	Jenis SOP	Teknis	FC halaman muka (cover), halaman yang menunjukkan tahapan-tahapan Prosedur, dan halaman yang menunjukkan ditandatanganinya SOP tsb	
		SOP #2	Jenis SOP	Teknis		
		SOP #3	Jenis SOP	Teknis		
		SOP #4	Jenis SOP	Teknis		
		SOP #5	Jenis SOP	Teknis		
3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA Pelaksanaan PERMEN yang ada	Perda		Photocopy halaman muka (cover), halaman kedua dan halaman yang menunjukkan ditandatanganinya perda pelaksanaan dari permen tsb	Masing-masing SKPD
		Jumlah PERDA Pelaksanaan PERMEN yang seharusnya ada	Perda		Daftar rincian yang menunjukkan Permen yang diterbitkan Kementerian teknis yang mengatur urusan yang ditangani	
4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada	Jabatan		Daftar rincian yang menunjukkan pejabat struktural yang menangani urusan terkait	Masing-masing SKPD
		Jumlah jabatan yang harus ada	Jabatan		FC Struktur organisasi dari SKPD khususnya bidang yang menangani urusan terkait	
5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jumlah Jabatan Fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jabatan		Daftar rincian yang menunjukkan jabatan fungsional yang ada di SKPD pada bidang yang menangani urusan terkait	Masing-masing SKPD
		1. Jabatan Fungsional #1	Jab Fungsional			
		2. Jabatan Fungsional #2	Jab Fungsional			
		3. Jabatan Fungsional #3	Jab Fungsional			
		4. Jabatan Fungsional #4	Jab Fungsional			
6	Rasio PNS Provinsi	Jumlah PNS SKPD	orang		Daftar rincian yang menunjukkan jumlah PNS SKPD pada bidang terkait	Masing-masing SKPD
		Jumlah PNS Provinsi	orang		Daftar rincian yang menunjukkan jumlah PNS Provinsi dari BKD	BKD
7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah Pejabat yang memenuhi persyaratan Diklatpim	orang		Daftar rincian yang menunjukkan jumlah pejabat yang ada yang telah memenuhi persyaratan diklatpim	Masing-masing SKPD
		Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang		Daftar rincian yang menunjukkan jumlah pejabat SKPD yang ada pada urusan terkait	
8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat SKPD yang memenuhi persyaratan kepangkatan	orang		Daftar rincian yang menunjukkan jumlah pejabat yang ada yang telah memenuhi persyaratan diklatpim	Masing-masing SKPD
		Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang		Daftar rincian yang menunjukkan jumlah pejabat SKPD yang ada pada urusan terkait	
9	Ada atau tidaknya dokumen perencanaan pembangunan di SKPD	Jumlah dokumen perencanaan yang ada	dokumen			
	-RENSTRA-SKPD	-RENSTRA-SKPD	ada/tidak		FC halaman muka (cover), halaman ke dua dan halaman yang menunjukkan ditandatanganinya renstra tsb	Masing-masing SKPD
	-RENJA-SKPD	-RENJA-SKPD	ada/tidak		FC halaman muka (cover), halaman ke dua dan halaman yang menunjukkan ditandatanganinya renja tsb	
	-RKA-SKPD	-RKA-SKPD	ada/tidak		FC halaman muka (cover), halaman ke dua dan halaman yang menunjukkan ditandatanganinya RKA tsb	

NO	IKK	ELEMEN DATA	SATUAN	ELEMEN DATA DLM LPPD	DOKUMEN PENDUKUNG/KERTAS KERJA	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7
10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD	program		Photocopy halaman muka (cover), halaman yang menunjukkan program dari skpd pada urusan terkait	Masing-masing SKPD
		Jumlah program RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD	program		FC halaman muka, dan halaman yang menunjukkan program dari SKPD pada urusan terkait	
11	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	program		FC halaman muka, dan halaman yang menunjukkan program dari SKPD pada urusan terkait yang ada renja yang diakomodir dalam RKA	Masing-masing SKPD
		Jumlah Program dalam RKA SKPD	program		FC halaman muka, dan halaman yang menunjukkan program dari SKPD pada urusan terkait yang tercantum dalam RKA	
12	Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	program		FC halaman muka, dan halaman yang menunjukkan program dari SKPD pada urusan terkait yang ada pada RKA dan diakomodir dalam DPA	Masing-masing SKPD
		Jumlah program dalam DPA SKPD	program		FC halaman muka, dan halaman yang menunjukkan program dari SKPD pada urusan terkait yang tercantum dalam DPA	
13	Anggaran SKPD terhadap total anggaran belanja APBD	Total anggaran SKPD	Rp		FC Laporan Keuangan SKPD	Masing-masing SKPD
		Total anggaran belanja APBD	Rp			
14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD	Realisasi Belanja Modal SKPD	Rp			Masing-masing SKPD
		Realisasi Belanja SKPD	Rp			
15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	Realisasi Belanja Pemeliharaan SKPD	Rp			Masing-masing SKPD
		Realisasi Belanja Barang dan Jasa SKPD	Rp			
16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD	Realisasi Belanja Pemeliharaan SKPD	Rp		Masing-masing SKPD	
		Realisasi Belanja SKPD	Rp			
17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, LRA, Calk)	Jumlah komponen laporan keuangan	komponen			
	- Neraca	- Neraca	ada/tidak		FC halaman muka, dan halaman yang menunjukkan neraca tsb	Masing-masing SKPD
	- LRA	- LRA	ada/tidak		FC halaman muka dan halaman yang menunjukkan LRA	
	- Calk	- Calk	ada/tidak		FC halaman muka dan satu atau dua halaman yang menunjukkan CALK	
18	<u>Adanya inventarisasi barang / asset SKPD</u>	<u>ada/tidak ada laporan inventarisasi barang/asset SKPD 5 tahun terakhir</u>	<u>ada/tidak</u>		<u>FC berita acara pelaksanaan inventarisasi Asset Tetap (2013-2018)</u>	Masing-masing SKPD dan Biro Aset
19	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD	Rp		Daftar rincian yang menunjukkan jumlah asset yang tidak digunakan atau digunakan oleh pihak lain	Masing-masing SKPD/Hasil Temuan BPK
		Total Asset yang dikuasai SKPD	Rp		Daftar rincian yang menunjukkan total aset yang dikuasai SKPD	
20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi :	Jumlah fasilitas/prasarana informasi	buah			Masing-Masing SKPD
	1. Papan Pengumuman	1. Papan Pengumuman	ada/tidak		Foto	
	2. Pos Pengaduan	2. Pos Pengaduan	ada/tidak		Foto	
	3. Leaflet	3. Leaflet	ada/tidak		FC Leaflet	
	4. Mobil keliling	4. Mobil keliling	ada/tidak		Daftar Inventaris	
5. Pengumuman di media massa	5. Pengumuman di media massa	ada/tidak		Foto		
21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada/tidak surat ketetapan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	ada/tidak		FC surat ketetapan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik pada urusan terkait, dan FC Cover Hasil Survey	Masing-Masing SKPD/tingkat Pemda